

**MODEL KOLABORASI AKTOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN
EKSTREM DI PEMERINTAH LOKAL**

TESIS

Oleh

**LISA ARYANI
NPM 2326061009**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**MODEL KOLABORASI AKTOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN
EKSTREM DI PEMERINTAH LOKAL**

Oleh

LISA ARYANI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRACT

ACTOR COLLABORATION MODEL FOR EXTREME POVERTY ALLEVIATION IN LOCAL GOVERNMENT

By

LISA ARYANI

Extreme poverty is a complex social problem that requires a collaborative approach across actors. This study aims to formulate a policy strategy for extreme poverty reduction at the local government level, emphasizing the synergy of stakeholder roles.

The study was conducted in South Lampung Regency using mixed methods (qualitative and quantitative) using the Institutional Analysis and Development (IAD) framework, stakeholder analysis, SWOT analysis, and the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM).

The results indicate that the collaborative structure remains hierarchical and predominantly top-down, driven by government agencies such as the Regional Development Planning Agency (Bappeda), the Social Affairs Agency, and the Community Empowerment and Development Agency (PMD). Relationships between actors are more coordinative than collaborative, with obstacles such as low trust, minimal two-way communication, and unequal roles and influence.

Based on the SWOT and QSPM analysis, strategy SO1 was selected as the best strategy with the highest score (TAS 7.10). This strategy proposes the integration of central policies and CSR programs into regional development priorities through public-private collaborative forums. These findings are expected to contribute to strengthening collaborative governance models in the regions.

Keywords: actor collaboration, extreme poverty, local governance, collaborative governance, IAD model, QSPM

ABSTRAK

MODEL KOLABORASI AKTOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI PEMERINTAH LOKAL

Oleh

LISA ARYANI

Kemiskinan ekstrem merupakan masalah sosial yang kompleks dan membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas aktor. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di tingkat pemerintah daerah, dengan menekankan sinergi peran para pemangku kepentingan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan dengan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) menggunakan kerangka *Institutional Analysis and Development* (IAD), analisis pemangku kepentingan, SWOT, dan *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM).

Hasil menunjukkan bahwa struktur kolaborasi masih bersifat hierarkis dan dominan top-down oleh instansi pemerintah seperti Bappeda, Dinas Sosial, dan Dinas PMD. Hubungan antaraktor lebih bersifat koordinatif daripada kolaboratif, dengan hambatan seperti rendahnya kepercayaan, minimnya komunikasi dua arah, serta ketimpangan peran dan pengaruh.

Dari analisis SWOT dan QSPM, strategi SO1 terpilih sebagai strategi terbaik dengan skor tertinggi (TAS 7,10). Strategi ini mengusulkan integrasi kebijakan pusat dan program CSR ke dalam prioritas pembangunan daerah melalui forum kolaboratif publik-swasta. Temuan ini diharapkan memberi kontribusi pada penguatan model tata kelola kolaboratif di daerah.

Kata Kunci: kolaborasi aktor, kemiskinan ekstrem, pemerintah lokal, tata kelola kolaboratif, model IAD, QSPM

**Judul Tesis : MODEL KOLABORASI AKTOR
PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI
PEMERINTAH LOKAL**

Nama Mahasiswa : Lisa Aryani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2326061009

Program studi : Magister Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si
NIP. 19720918 200212 2 002

Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si
NIP. 19691103 200112 1 002

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**

Dr. Supto, S.Sos., M.A.B.
NIP. 19690226 199003 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si**



Sekretaris : **Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Devi Yulianti, S.A.N., MA., Ph.D**

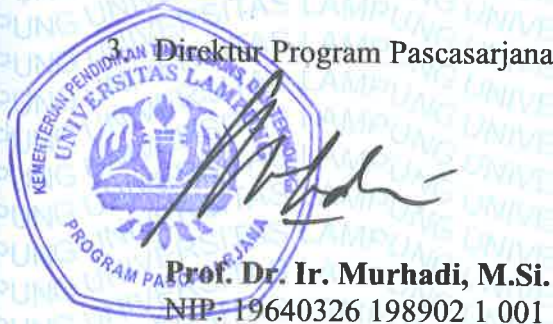


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustiha Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 19760821 200003 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **30 Juli 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Lisa Aryani

NPM 2326061009

RIWAYAT HIDUP



Penulis Tesis ini bernama Lisa Aryani, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 01 Januari 1992. Sebagai anak terakhir dari tiga bersaudara, dari Bapak Bohidi dan Ibu Maryatun.

Latar Belakang yang telah dijalankan oleh Penulis dimulai dari pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK. Handayani lulus pada tahun 1999. Pendidikan sekolah dasar diselesaikan di SDN 2 Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung pada Tahun 2004, melanjutkan di SMPN 7 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2007, Sekolah Menengah Atas diselesaikan di SMAN 3 Bandar Lampung pada Tahun 2010.

Tahun 2010 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan lulus pada Tahun 2014. Selama menjadi mahasiswa, Penulis pernah mengikuti berbagai organisasi tingkat fakultas dan Universitas, yaitu HMJ ABI FISIP UNILA tahun 2012—2013 dan Komunitas Beswan PGN UNILA 2013—2014.

Pada tahun 2021 penulis bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian, pada Tahun 2023 Penulis melanjutkan pendidikan pada Program Magister Ilmu Administrasi (Publik) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MOTTO

"Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga."

—**Hadis Riwayat Muslim**

"The best way to predict the future is to create it."

Cara terbaik untuk meramalkan masa depan adalah dengan menciptakannya.

— **Abraham Lincoln**

PERSEMBAHAN

*Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT serta ketulusan hati, karya sederhana ini
kupersembahkan sebagai tanda bakti, cinta, dan penghargaan tulus kepada :*

*Kedua orangtuaku tercinta, atas segala kasih sayang, doa yang tiada henti, serta perjuangan
yang tak pernah lelah dalam mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan..*

*Keluargaku dan sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan
kesabaran dalam setiap proses yang kulalui, khususnya dalam penyusunan tesis ini.*

Almamater tercinta, Universitas Lampung

*tempatku tumbuh, belajar, dan mengukir pengalaman berharga dalam perjalanan akademik
dan kehidupan.*

SANWACANA

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِكَ

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah S.W.T atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Penulisan Tesis dengan judul “*Model Kolaborasi Aktor Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Pemerintah Lokal*” ini merupakan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Administrasi Publik di Universitas Lampung.

Keberhasilan dalam penyusunan ini tidak terlepas dari adanya petunjuk, bimbingan, dorongan dan semangat baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Z, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Suropto, S.Sos., M.A.B, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung .
4. Ibu Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si, selaku Pembimbing I, atas semua masukan, saran dan bimbingan yang diberikan dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si, selaku Pembimbing II, atas semua masukan, saran dan bimbingan yang diberikan dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
6. Ibu Devi Yulianti, S.A.N., MA., Ph.D, selaku Dosen Penguji, atas segala kritik, masukan, dan saran yang membangun yang telah memperkaya kualitas penyusunan tesis ini.

7. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.I.P., M.Si, selaku Pembimbing Akademik atas perhatian, arahan, dan evaluasi selama menempuh studi di Universitas Lampung.
8. Para informan penelitian yang telah memberikan data dan informasi yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini.
9. Seluruh staf pengajar dan akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, khususnya Program Studi Magister Ilmu Administrasi.
10. Kepada keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua, pasangan, dan saudara-saudara yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, semangat, serta dukungan moral maupun materiil yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama proses penulisan tesis ini yang belum bisa disebutkan satu-persatu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis, mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan akhirnya Penulis berharap bahwa Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Juli 2025

Penulis

Lisa Aryani

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tesis dengan judul “**Model Kolaborasi Aktor Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Pemerintah Lokal**” merupakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan dan diterima dengan senang hati. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membacanya. Aamiin

Bandar Lampung, 30 Juli 2025

Penulis,

Lisa Aryani

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR GRAFIK	xx
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
2.2 Kemiskinan.....	24
2.2.1 Kemiskinan Ekstrem.....	24
2.2.2 Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	26
2.3 Kebijakan Publik	28
2.3.1 Aktor dalam Kebijakan Publik	28
2.3.1.1 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	32
2.3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Selatan	35
2.3.2 Hubungan Antar Aktor	37
2.3.3 Peran Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Publik.....	39
2.4 Kolaborasi	42
2.4.1 Kolaborasi Antaraktor dalam Kebijakan Publik.....	42
2.4.2 Pendekatan Kolaborasi dalam Pemerintahan Daerah	45
2.4.3 Kolaborasi dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	46
2.5 Teori Tata Kelola (<i>Governance Theory</i>)	47

2.5.1 <i>Robust Governance</i>	49
2.5.2 <i>Agile Governance</i>	51
2.6 Model Institutional Analysis and Development (IAD) Elinor Ostrom	52
2.7 Kerangka Pikir Penelitian.....	56
III. METODE PENELITIAN	57
3.1 Desain Penelitian	57
3.2 Sumber Data	67
3.2.1 Peristiwa.....	67
3.2.2 Informan Penelitian.....	67
3.2.3 Dokumen.....	70
3.3 Gambaran Areal dan Lokasi Penelitian.....	71
3.3.1 Lokasi Penelitian.....	71
3.3.2 Fokus Penelitian.....	72
3.4 Teknik Pengumpulan Data	73
3.5 Teknik Analisis Data	74
3.5.1 Analisis <i>Stakeholder (Power-Interst Grid)</i>	77
3.5.2 Net Map	83
3.5.3 Analisis SWOT	85
3.5.4 <i>Qualitative Strategic Planning Matriks (QSPM)</i>	90
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	93
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	93
4.1.1 Sejarah Kawasan.....	93
4.1.2 Letak dan Luas Kawasan.....	94
4.1.3 Kondisi Biogeofisik Kawasan	94
4.1.4 Potensi Keanekaragaman Hayati dan Non Hayati.....	94
4.1.5 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat	95
4.2 Hasil Penelitian.....	96
4.2.1 <i>Biophysical Conditions</i>	98
4.2.2 <i>Attributes of Community</i>	100
4.2.3 <i>Rules-in-Use</i>	101
4.2.4 <i>Action Arena</i>	102
4.2.5 <i>Patterns of Interaction</i>	103
4.2.6 <i>Outcomes</i>	104
4.2.7 <i>Evaluative Criteria</i>	105

4.3 Pembahasan	106
4.3.1 <i>Biophysical Conditions</i>	106
4.3.2 <i>Attributes of Community</i>	107
4.3.3 <i>Rules-in-Use</i>	108
4.3.4 <i>Action Arena</i>	109
4.3.5 <i>Patterns of Interaction</i>	110
4.3.6 <i>Outcomes</i>	111
4.3.7 <i>Evaluative Criteria</i>	112
4.4 <i>Stakeholder Analysis</i>	115
4.4.1 <i>Identifikasi Stakeholder</i>	116
4.4.2 <i>Matriks Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder</i>	128
4.4.3 <i>Analisis Posisi dan Strategi</i>	143
4.4.4 <i>Implikasi terhadap Kolaborasi</i>	145
4.5 Analisis SWOT.....	147
4.6 Analisis QSPM dalam Penentuan TAS	154
4.7 Rekomendasi Model Kolaborasi Aktor Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.....	156
V. SIMPULAN DAN SARAN	161
5.1 Kesimpulan.....	161
5.2 Keterbatasan Penelitian	162
5.3 Saran	163
DAFTAR PUSTAKA	166
LAMPIRAN	172
Tabel 1-10.....	173
Gambar 1-5.....	173

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2. Bentuk Kolaborasi Berdasarkan Tujuan, Struktur, Proses dan Sumber	43
Tabel 3. Definisi Konseptual dan Operasional Model Ostrom IAD (2014) Berdasarkan Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder	59
Tabel 4. Informan Penelitian.....	68
Tabel 5. Kriteria Penilaian Tingkat Pengaruh (Influence) Stakeholder dalam Kolaborasi Aktor Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	78
Tabel 6. Kriteria Penilaian Tingkat Kepentingan (Interest) Stakeholder dalam Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.....	80
Tabel 7. Format Penilaian Bobot Strategi Internal	87
Tabel 8. Format Penilaian Bobot Strategi Eksternal.....	87
Tabel 9. Matriks SWOT	89
Tabel 10. Format Matriks QSPM.....	91
Tabel 11. Skor Rata-rata Biophysical Conditions.....	100
Tabel 12. Skor Rata-rata Attributes of Community	100
Tabel 13. Skor Rata-rata Rules-in-Use	101
Tabel 14. Skor Rata-rata Action Arena.....	103
Tabel 15. Skor Rata-rata Patterns of Interaction.....	104
Tabel 16. Skor Rata-rata Outcomes	105
Tabel 17. Skor Rata-rata Evaluative Criteria	106
Tabel 18. Daftar Stakeholder Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan.....	116
Tabel 19. Hubungan antar Stakeholder berdasarkan Aspek Command, Money, Information dan Advice	120
Tabel 20. Kalsifikasi Aktor berdasarkan Pengaruh dan Kepentingan	128

Tabel 21. IFE dan EFE Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lampung Selatan	147
Tabel 22. Analisis SWOT berdasarkan hasil kajian dokumen, data sekunder dan kuesioner	150
Tabel 23. Matriks TOWS – Strategi Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lampung Selatan	152
Tabel 24. Hasil Analisis QSPM	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Peta Sebaran Jumlah Kepala Keluarga Miskin (desil 1-4).....	11
Gambar 2. Vicious circles of poverty (Ragnar Nurkse, 1944).....	27
Gambar 3. Ostorm Institutional Analysis Development (IAD) Framework.....	53
Gambar 4. Kerangka Pikir.....	56
Gambar 5. Model Analisis Miles Huberman, Saldana (2014)	75
Gambar 6. Matriks Hubungan Aktor (Net Map).....	85
Gambar 7. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Selatan	99
Gambar 8. Eksisting Model Kolaborasi aktor Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan	114
Gambar 9. Stakeholder-Issue Interrelationship Diagram.....	116
Gambar 10. Identifikasi Relasi Aktor Menggunakan Net Map	127
Gambar 11. Kategori Aktor Berdasarkan Pengaruh dan Potensi Kerjasama.....	131
Gambar 12. Model Rekomendasi Kolaborasi Aktor Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	159

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
Grafik 1. Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2020—2024.....	2
Grafik 2. Persentase Kemiskinan Ekstrem Indonesia Tahun 2020—2024.....	3
Grafik 3. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Indonesia	10
Grafik 5. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin	25
Grafik 6. Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Lampung Selatan.....	26
Grafik 11. Matriks Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder	82
Grafik 18. Pemetaan Stakeholder dalam Matriks Pengaruh dan Kepentingan Aktor	132
Grafik 19. Matrik Internal Eksternal Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	151

DAFTAR SINGKATAN

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Menengah Nasional
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
PPP	: <i>Purchasing Power Parity</i>
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
PKH	: Program Kemiskinan Harapan
KMK	: Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs	: <i>Millennium Development Goals</i>
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
P3KE	: Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
BPS	: Badan Pusat Statistik
IAD	: <i>Model Institutional Analysis and Development</i>
QSPM	: <i>Quantitative Strategic Planning Matrix</i>
TKPK	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TKPKD	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PALUMA	: Perempuan Anak Lingkungan Usaha Mikro dan Agribisnis
THLS	: Tenaga Harian Lepas Sukarela
RPKD	: Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
BPNT	: Bantuan Pangan Non-Tunai

UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
TKSK	: Tenaga Kerja Sosial Kecamatan
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa.
Dinas PMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

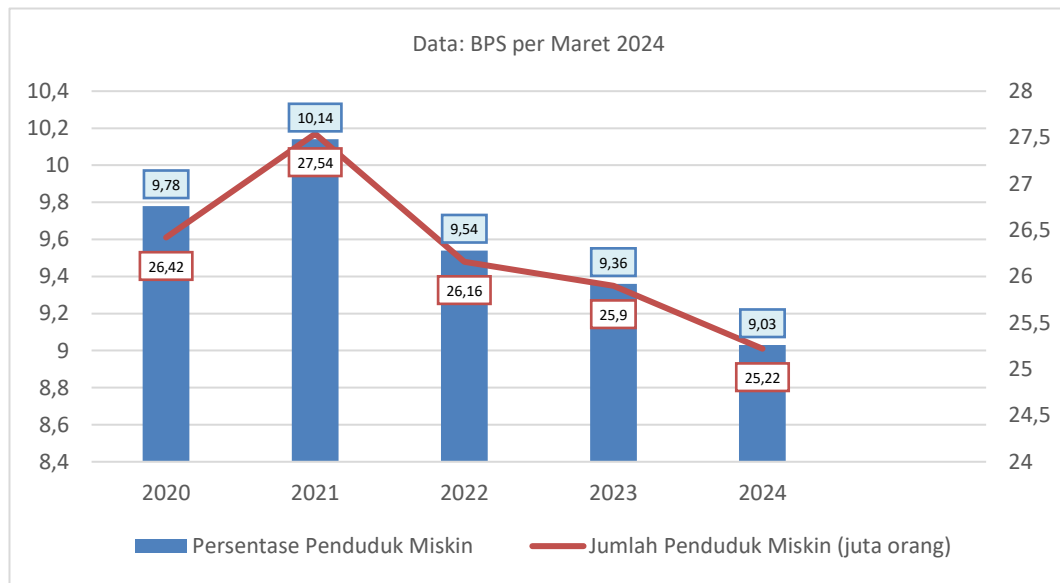
Kemiskinan diakui sebagai tantangan global utama oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menetapkan target pengurangan separuh angka kemiskinan global sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tahun 2024. SDGs yang ditetapkan pada 2015 menjadi panduan global untuk kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan. Namun, Laporan SDGs 2024 yang dikeluarkan oleh PBB menunjukkan bahwa tidak jelas apakah SDGs akan tercapai pada tahun 2030 (SDGs, 2024). Namun demikian, kendala pelaksanaan SDGs semakin tampak melalui sejumlah tantangan serius yang menghambat realisasi target-target tersebut. Di antaranya, ketidakmerataan distribusi sumber daya dan infrastruktur di berbagai wilayah mengakibatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih terbatas, terutama di daerah terpencil dan marginal.

Perubahan iklim serta konflik regional dan global turut menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan sosial yang semakin memperumit upaya penanggulangan kemiskinan. Krisis pangan dan gangguan pada rantai pasokan juga menjadi faktor signifikan yang menambah kompleksitas permasalahan, sedangkan perbedaan prioritas antara negara maju dan negara berkembang semakin memperjelas dinamika politik global dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. (SDGs, 2024). Sejalan dengan itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020–2024 menetapkan tujuan jangka panjang untuk mengurangi tingkat kemiskinan menjadi satu digit dengan fokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. RPJMN ini menargetkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 6,5—7,5% pada tahun 2024, sebagai bagian dari upaya besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di seluruh negeri. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan

di Indonesia masih merupakan masalah serius, dengan sekitar 9,03% dari populasi hidup di bawah garis kemiskinan nasional (Bappenas, 2019).

Berikut ini ditampilkan tingkat kemiskinan Indonesia tahun 2020-2024 pada Grafik 1 :

Grafik 1. Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2020—2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (data diolah peneliti)

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 menegaskan perlunya pendekatan khusus untuk mengejar target penurunan kemiskinan nasional yang masih belum tercapai secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Target RPJMN 2020-2024 untuk angka kemiskinan nasional sebesar 6,5—7,5%, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk dapat menurunkan sedikitnya 1,53% poin untuk mencapai target 7,5% di tahun 2025.

Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan strategis untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Salah satunya adalah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga serta memperkuat program-program yang dapat mengurangi jumlah keluarga miskin ekstrem di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan

pembentukan peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial secara signifikan adalah fokus kebijakan ini.

Kemiskinan ekstrem sendiri didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada dibawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) (TNP2K, 2024). Kemiskinan ekstrem dapat dikatakan sebagai kategori masyarakat yang miskin dan berada di 10% terendah (desil 1 kemiskinan), sehingga kehidupan masyarakat lebih memprihatinkan dan sangat jauh dari batas garis kemiskinan.

Angka kemiskinan ekstrem di Indonesia sendiri hingga saat ini berada pada 0,83% di tahun 2024. Hal ini tentu saja masih belum mencapai target kemiskinan ekstrem Indonesia yaitu nol persen. Berikut ditampilkan grafik persentase kemiskinan ekstrem di Indonesia Tahun 2020-2024:

Grafik 2. Persentase Kemiskinan Ekstrem Indonesia Tahun 2020—2024



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024)

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi sosial yang kompleks, bukan sekadar keterbatasan penghasilan, tetapi juga ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak. Dalam konteks Indonesia, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi rumah tangga dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan parah, yaitu kurang dari USD 1,9 per hari berdasarkan standar Bank Dunia (World Bank, 2020). Namun, lebih dari sekadar angka, kemiskinan ekstrem

menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dalam karena menyangkut martabat hidup seseorang.

Ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan merupakan tiga fondasi utama dalam mengukur dan mengatasi kemiskinan ekstrem. Ketahanan pangan, misalnya, bukan hanya soal ketersediaan bahan makanan, tetapi juga soal aksesibilitas dan keterjangkauan terhadap makanan yang bergizi. Di banyak wilayah, seperti Kabupaten Lampung Selatan, paradoks sering kali muncul: daerah subur dan kaya akan hasil pertanian justru menyimpan kantong-kantong kemiskinan ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya alam tidak secara otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat setempat (FAO, 2022). Demikian pula dalam sektor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan penduduk mempersempit peluang kerja yang layak dan produktif. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali harus berhenti sekolah lebih awal karena keterbatasan biaya, yang pada gilirannya melanggengkan siklus kemiskinan antar generasi (UNESCO, 2021). Dalam bidang kesehatan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas mengakibatkan kelompok miskin lebih rentan terhadap penyakit, yang pada akhirnya juga mengurangi produktivitas ekonomi mereka (WHO, 2020).

Beragam program telah disusun, namun tantangan utamanya terletak pada pemanfaatan sumber daya daerah yang belum optimal. Sering kali, sumber daya alam seperti hasil pertanian, perikanan, dan potensi wisata belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan. Perspektif yang dominan lebih berorientasi pada pembangunan fisik atau birokratik, sementara pendekatan sosial dan kolaboratif masih belum menjadi arus utama (Adisasmita, 2014). Sumber daya yang melimpah memerlukan tata kelola yang melibatkan aktor lintas sektor. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi kompleksitas kemiskinan ekstrem. Dibutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat, sektor swasta, LSM, media, dan lembaga pendidikan. Setiap kelompok ini memiliki persepsi dan narasi masing-masing terhadap kemiskinan. Misalnya, kelompok masyarakat sipil sering kali membingkai kemiskinan dalam narasi ketidakadilan distribusi, sementara pemerintah melihatnya dari sisi kurangnya kapasitas anggaran atau efektivitas kebijakan. Sementara itu, media turut membentuk opini publik melalui

pemberitaan yang kadang menekankan dramatisasi atau stigma terhadap kelompok miskin (Jatmiko, 2022).

Dalam konteks inilah pentingnya membangun *model kolaborasi aktor* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Kolaborasi lintas sektor bukan hanya tentang duduk bersama dalam forum perencanaan, tetapi juga tentang bagaimana setiap aktor dengan pengaruh, kepentingan, dan kapasitas yang berbeda bersedia berbagi peran dan tanggung jawab untuk mencapai hasil yang nyata. Pendekatan ini memerlukan kepercayaan, komunikasi terbuka, dan ruang partisipasi yang inklusif.

Selanjutnya, dalam upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah juga menerapkan program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), yang meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dengan memberikan bantuan tunai. Program ini termasuk dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Untuk memastikan bahwa keuntungan dari kebijakan ini tersebar di seluruh negeri, metode ini diintegrasikan dengan dana desa dan program kesehatan nasional. Selain itu, KMK Nomor 25 Tahun 2022 menetapkan standar dan indikator kemiskinan ekstrem serta rencana untuk memerangnya, termasuk menentukan wilayah mana yang membutuhkan perhatian khusus. Dalam hal ini, Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu daerah yang masih menghadapi masalah besar terkait kemiskinan ekstrem. Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan lebih banyak program dan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Kabupaten Lampung Selatan sendiri telah melakukan berbagai kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Salah satunya yaitu, seperti mengeluarkan surat edaran tentang penggunaan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) bagi setiap wilayah demi ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial di daerah. Kemudian, melaksanakan musrenbang desa untuk menerima aspirasi masyarakat desa dalam melakukan pemberian bantuan sesuai kebutuhan masyarakat. Namun hal tersebut masih belum berpengaruh dalam mencapai target persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebesar 0% (Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2023).

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menginisiasi sejumlah kegiatan berbasis kolaborasi lintas

sektor, seperti pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan tokoh masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, dan perangkat desa dalam perumusan program sosial, forum konsultasi publik mengenai penyaluran bantuan sosial berbasis data P3KE, serta sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta dalam program pemberdayaan ekonomi lokal. Kegiatan-kegiatan ini mencerminkan adanya proses interaksi dan pembagian peran antaraktor, yang menjadi cerminan awal dari praktik tata kelola kolaboratif dalam lingkup lokal. Meskipun demikian, efektivitas dan keberlanjutan kolaborasi ini masih membutuhkan penguatan dari sisi struktur, mekanisme, dan komitmen bersama untuk menghadapi kompleksitas penanggulangan kemiskinan ekstrem secara lebih strategis dan berkelanjutan.

Meskipun Kabupaten Lampung Selatan telah menerapkan berbagai kebijakan, kurangnya koordinasi antara para aktor kepentingan, serta seringnya pergantian pimpinan, merupakan kendala utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pergantian pimpinan yang berulang menyebabkan perubahan prioritas dan kebijakan yang tidak konsisten, yang menghambat pelaksanaan program yang telah direncanakan (Harivarman, 2017). Selain itu, ketidaksepakatan di antara para aktor kepentingan terkait seringkali menghambat pelaksanaan kebijakan yang seharusnya bekerja sama. Karena kurangnya koordinasi ini, masyarakat miskin ekstrem tidak dapat mendapatkan dukungan yang cukup. Akibatnya, pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah semakin sulit dicapai (Oktavianti & Lituhayu, 2017).

Keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem juga sangat tergantung pada sejauh mana para aktor yang memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Komitmen ini tidak hanya terbatas pada tingkat kebijakan formal, tetapi juga melibatkan dukungan aktif dari berbagai aktor ekonomi dan politik di dalam daerah. Kurangnya komitmen yang solid di daerah, menyulitkan dalam menstabilkan prioritas dan agenda penanggulangan kemiskinan terlebih saat terjadi pergantian kepemimpinan. Selain itu, membangun hubungan yang kuat dan efektif antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta kemungkinan dapat meningkatkan kemampuan untuk menanggapi perubahan kondisi dan prioritas dalam

penanggulangan kemiskinan ekstrem. Serta kurangnya kerja sama yang erat antara antaraktor ini dapat memastikan bahwa sumber daya yang tersedia belum dioptimalkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang paling rentan (Gedeona, 2013).

Akibat dari ketidakmampuan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem sangatlah besar. Ketidakmampuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem mengancam tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara keseluruhan. Khususnya, ketidakmampuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem mengancam tercapainya target SDGs tujuan pertama tanpa kemiskinan (*no poverty*), yang menargetkan penghapusan kemiskinan setidaknya setengah dari jumlah manusia di dunia dengan pengukuran orang yang hidup menggunakan lebih dari \$1,25 per hari (*Nations*, 2024).

Untuk mengatasi kemiskinan manusia *United Nations* mengemukakan seruan untuk komitmen baru dalam memerangi kemiskinan dan visi baru tentang masa depan. Dalam pengentasan kemiskinan ekstrem terdapat pula beberapa keberhasilan dengan formula pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, disertai dengan strategi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan bagi mereka yang paling miskin. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu masalah paling serius di daerah-daerah, dan kebijakan ekonomi menjadi penentu utama kemiskinan dan ketimpangan. UNDP merupakan pendukung global untuk dana bantuan dan peluang perdagangan yang harus menjadi bagian dari setiap rencana untuk mengakhiri kemiskinan. Pada akhirnya, UNDP harus menyatukan koalisi global yang menempatkan kemiskinan di puncak agenda (Toye, 2007).

Selanjutnya menurut Singh (2020), strategi pengentasan kemiskinan di India biasanya menggunakan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas. Studi menunjukkan bahwa metode ini mencakup tata kelola yang baik, peningkatan kapabilitas dan jaminan sosial, dan pembiayaan mikro berbasis organisasi komunitas. Simulasi berbasis peta kognitif fuzzy (FCM) menekankan bahwa penggunaan pendekatan terintegrasi dan multidimensi dalam memerangi kemiskinan sangat penting, model ini menggabungkan elemen dari berbagai

pendekatan yang berbeda (Singh & Chudasama, 2020). Sama halnya seperti penelitian yang dilakukan di Afrika, melalui pendekatan pengembangan berbasis aset, yang mengintegrasikan pembentukan modal manusia, sosial, dan ekonomi, memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan di Afrika Sub-Sahara. Program pengembangan berbasis aset, yang juga dikhususkan pada program pembiayaan mikro berbasis tabungan, dapat mendorong pengembangan dan pengentasan kemiskinan (Ssewamala *et al.*, 2010). Begitu pula dengan penelitian ini yang juga memanfaatkan aset, yaitu dengan sumber daya milik bersama (CPRs) memainkan peran penting dalam strategi penghidupan berkelanjutan, terutama bagi perempuan dan laki-laki miskin di India. CPRs membantu dalam strategi adaptasi dan penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan aset dan kekuatan lokal (Beck & Nesmith, 2001).

Hal berbeda diungkapkan pada penelitian di Afrika Sub-Sahara, yaitu dimana kemiskinan global rentan terhadap guncangan eksternal seperti ketidakstabilan politik, konflik lokal, dan perubahan iklim. Skema "STAR" yang mencakup stabilitas politik, pengentasan kemiskinan yang ditargetkan, dan revitalisasi daerah pedesaan diusulkan untuk meningkatkan kapasitas ketahanan dalam pengentasan kemiskinan (Li *et al.*, 2021). Selanjutnya dalam penanggulangan kemiskinan, peran para pemangku kepentingan yang terlibat juga sangat berpengaruh seperti dalam pembentukan *Collaborative Governance* dalam program pemberdayaan masyarakat yang terfokus pada pengentasan kemiskinan disimpulkan menjadi tata kelola yang kolaboratif antar pemangku kepentingan, pemerintah sebagai fasilitator, keaktifan masyarakat serta penguatan kelembagaan di dalamnya, serta bantuan pihak swasta dalam pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan nasional.

Masyarakat miskin tidak lagi menjadi objek mitigasi, namun menjadi subjek yang dalam keseluruhan prosesnya melibatkan masyarakat. Dengan adanya program pemberdayaan, masyarakat mempunyai tugas dan menghilangkan budaya miskin, masyarakat miskin yang hanya bergantung pada bantuan langsung dari pemerintah (Khasanah *et al.*, 2021). Selain itu, model kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Hal

ini menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat memastikan solusi penanggulangan kemiskinan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Lawelai & Nurmandi, 2023). Senada dengan penelitian sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh Lukman menyatakan bahwa kolaborasi para pemangku kepentingan memungkinkan penggabungan sumber daya, berbagi keahlian, dan koordinasi upaya yang dapat meningkatkan dampak dan mengatasi keterbatasan intervensi yang terisolasi (Lukman, 2024).

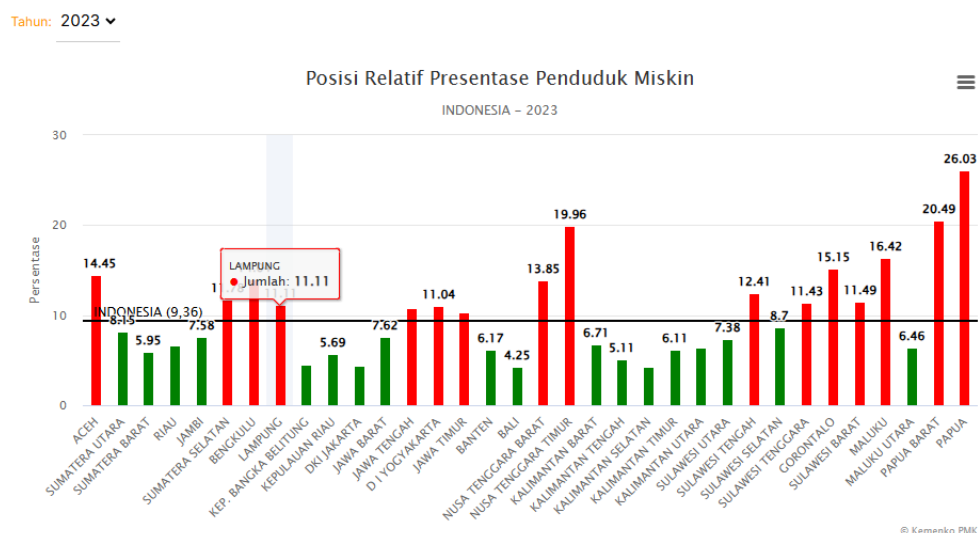
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengembangkan berbagai model kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan global, dengan menekankan pendekatan berbasis modal manusia (*human capital approach*). Pendekatan ini berfokus pada investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kapasitas individu dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial (Peck, 2011). Program seperti *Millennium Development Goals* (MDGs) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi acuan utama dalam merancang kebijakan di berbagai negara. Selain itu, PBB juga mendorong implementasi kebijakan transfer tunai bersyarat (*Conditional Cash Transfers/CCTs*), yang memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu, seperti keharusan menyekolahkan anak dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin (Fiszbein & Schady, 2009). Model ini telah diadopsi oleh berbagai negara berkembang sebagai strategi utama dalam menekan angka kemiskinan, karena efektivitasnya dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan (World Bank, 2009).

Di tingkat nasional, berbagai negara telah menerapkan model kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing. Meksiko dan Brasil, misalnya, mengembangkan program *Oportunidades* dan *Bolsa Familia*, yang terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperbaiki akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan (Levy, 2007). Negara-negara lain di Afrika dan Asia juga menerapkan pendekatan serupa dengan variasi pada skema insentif dan persyaratan penerima manfaat. Ethiopia, misalnya, mengembangkan *Productive Safety Net Programme (PSNP)*, yang menggabungkan transfer tunai dengan program kerja sosial untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan (Devereux *et al.*, 2006). Sementara itu, India menerapkan *Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)*, yang menjamin

100 hari kerja berbayar bagi rumah tangga miskin di pedesaan (McDonnell *et al.*, 2003). Di Indonesia, pemerintah mengadopsi model yang sejalan dengan kebijakan global melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dengan memberikan bantuan finansial guna meningkatkan daya beli dan akses terhadap layanan dasar.

Persentase kemiskinan Pulau Sumatera berada di posisi ke empat, dengan persentase kemiskinan lebih tinggi dari pulau Jawa dan Kalimantan. Selanjutnya terdapat beberapa provinsi di Indonesia dengan angka kemiskinan melebihi angka kemiskinan Nasional. Seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah berikut ini:

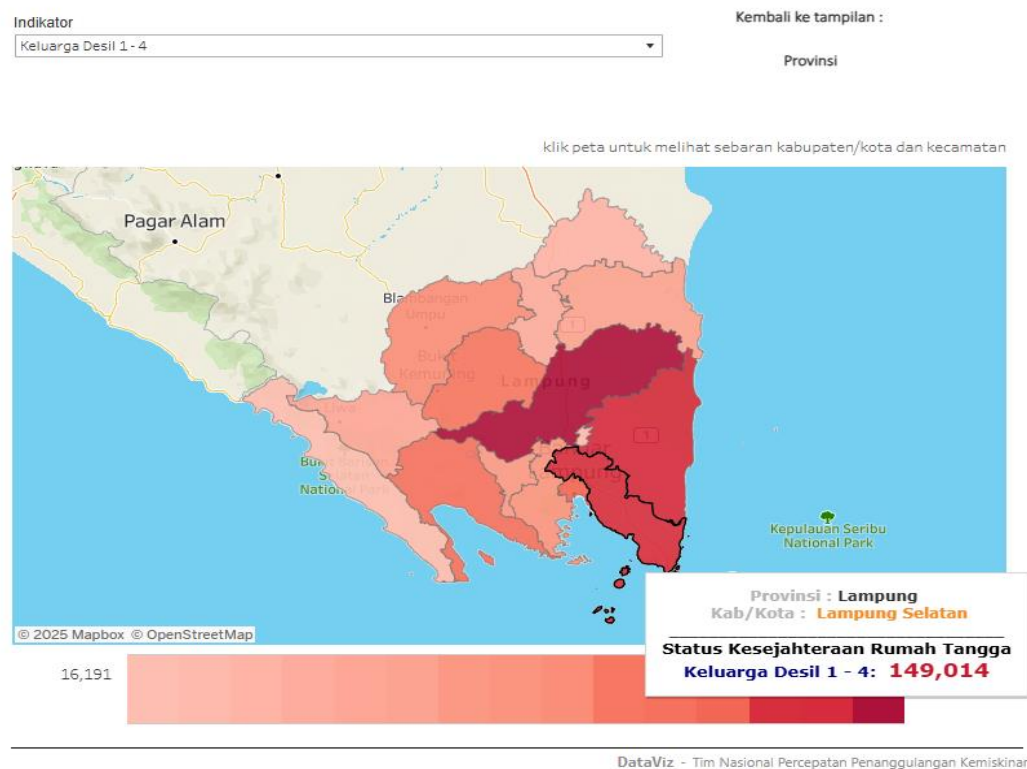
Grafik 3. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada grafik berikut terlihat bahwa di tahun 2023 Provinsi Lampung termasuk dalam provinsi dengan persentase kemiskinan melebihi persentase Nasional, yaitu persentase penduduk miskin provinsi Lampung sebesar 11,11% sedangkan angka kemiskinan Indonesia sebesar 9,36%. Badan Pusat statistik (BPS) juga mencatat bahwa persentase penduduk miskin Provinsi Lampung dari tahun 2015—2023 selalu berada di atas angka kemiskinan Nasional. Hal ini yang membuat Provinsi Lampung masuk dalam daftar Provinsi yang ada dalam Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan sesuai dengan Kepmenko PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024.

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu Kabupaten yang masuk dan terdata dalam Kepmenko PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan kemiskinan Ekstrem tahun 2022-2024. Data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan peta sebaran jumlah keluarga miskin atau yang masuk dalam cakupan desil 1-4 di wilayah Provinsi Lampung tahun 2024. Sebaran data itu menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan berada pada urutan ketiga terbanyak jumlah keluarga miskin (desil 1-4) yaitu sebanyak 149.014 kepala keluarga, setelah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur. Berikut di tampilkan gambar peta sebaran jumlah kepala keluarga dengan status kesejahteraan 1-4 (kategori miskin) di Provinsi Lampung:



Gambar 1. Peta Sebaran Jumlah Kepala Keluarga Miskin (desil 1-4)

Dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, pemerintah pusat dan daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, telah menerapkan berbagai model kolaborasi kebijakan. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan ekstrem masih belum mengalami penurunan yang signifikan sesuai dengan target Presiden

Republik Indonesia sebesar 0%. Banyak masalah yang masih menghambat keberhasilan program ini, termasuk ketidaksesuaian sasaran penerima manfaat, keterbatasan anggaran, dan kurangnya koordinasi antar-lembaga (Peck, 2011). Selain itu, pendekatan yang didasarkan pada insentif ekonomi seringkali tidak cukup untuk mengatasi masalah utama yang menyebabkan kemiskinan, seperti kesenjangan ekonomi dan kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak (Globalization, 2004)

Realitas kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya terlihat dari angka statistik resmi, tetapi juga diperkuat oleh pemberitaan media. Berdasarkan laporan Tribun Lampung (25 Mei 2023), terdapat 35 desa yang masih mengalami kemiskinan ekstrem, menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan sekadar angka, melainkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan model top-down belum cukup efektif untuk menjangkau seluruh wilayah dan kelompok sasaran.

Studi menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial yang bersifat sementara cenderung hanya menjadi solusi jangka pendek dan tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan secara fundamental (Schram *et al.*, 2008). Oleh karena itu, diperlukan model kebijakan yang lebih kontekstual dan adaptif, yang tidak hanya berfokus pada bantuan finansial, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat serta pemberdayaan ekonomi jangka panjang (Hulme & Fukuda-Parr, 2015). Dengan pendekatan ini, kebijakan pengentasan kemiskinan diharapkan dapat lebih efektif dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan merata.

Sejalan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022–2024, Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu daerah prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Namun, berdasarkan penjelasan *United Nations Development Programme* (UNDP) mengenai pengentasan kemiskinan serta pengalaman berbagai negara dalam menerapkan kebijakan serupa, model kebijakan yang selama ini diterapkan, termasuk di Indonesia, masih belum optimal dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan.

Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang mampu memetakan hubungan antaraktor, memahami dinamika kolaborasi, serta menilai bagaimana institusi dan aturan yang berlaku memengaruhi hasil kebijakan. Salah satu pendekatan yang relevan adalah *Model Institutional Analysis and Development* (IAD) yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom. Model ini memungkinkan analisis terhadap konteks biofisik, aturan kelembagaan, atribut komunitas, serta interaksi dalam situasi tindakan yang menghasilkan berbagai outcome (Ostrom, 2011).

Menurut penjelasan *United Nations Development Programme* mengenai Peggantasan Kemiskinan serta model kebijakan penanggulangan kemiskinan yang digunakan di negara lain, menunjukkan bahwa model kebijakan yang selama ini diterapkan PBB, masih belum optimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing. Sedangkan model kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang seperti Afrika Selatan, dengan pembentukan *Collaborative Governance* cukup berhasil menekan angka kemiskinan. Kemiskinan ekstrem masih menjadi permasalahan serius di tingkat pemerintah lokal terutama Kabupaten Lampung Selatan, meskipun berbagai program telah dilaksanakan. Salah satu kendala utama dalam penanggulangan kemiskinan adalah fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi antaraktor, baik pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), maupun masyarakat. Akibatnya, program yang dijalankan sering kali tidak terintegrasi secara optimal, sehingga efektivitasnya rendah.

Oleh karena itu, diperlukan suatu model kolaborasi antaraktor yang lebih terstruktur dan berbasis kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Salah satu kerangka yang relevan untuk menganalisis dinamika kolaborasi dan tata kelola publik adalah *Model Institutional Analysis and Development* (IAD) yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom. Model ini menekankan pentingnya interaksi antaraktor dalam situasi tindakan (*action situation*), serta pengaruh dari konteks biofisik, aturan kelembagaan, dan atribut komunitas dalam membentuk keberhasilan kolaborasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana struktur kelembagaan lokal, hubungan antaraktor, dan faktor lingkungan memengaruhi efektivitas

penanggulangan kemiskinan ekstrem di pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Lampung Selatan.

Seperti pada penelitian yang dilakukan Edoardus., *et al.*, (2024) yang melakukan penerapan model ini di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* di Kabupaten Tanimbar sudah berjalan tetapi belum optimal dalam aspek kolaborasi antara pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penanggulangan kemiskinan, penanggulan kemiskinan yang sifatnya parsial tanpa memiliki tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan belum tepat sasaran, seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan yang belum optimal (Koisin, 2024). Kemudian penelitian yang sama dilakukan oleh Novita dkk (2024), pada penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai dengan situasi masyarakat desa yang membutuhkan banyak bantuan, telah terdapat *collaborative governance* dalam upaya menangani kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo dapat dikatakan cukup karena keempat tahapan proses kolaboratif masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki serta terdapat tiga faktor yang belum berjalan dengan baik yaitu faktor struktur jaringan dan sumber daya modal (Ramadhani *et al.*, 2024)

Menurut Inka Nusamuda (2023), skema pengentasan kemiskinan ditinjau dengan *collaborative Governance* di kota Mataram berjalan dengan baik. Kerjasama kolektif antara Pemerintah dan Swasta mampu menekan angka pengentasan kemiskinan di Kota Mataram (Pratama, 2023). Sejalan dengan itu, penelitian oleh Sofa (2021) menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* Program Gandeng Gendong yang dilaksanakan di Desa Tegalpanggung berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya tujuh kelompok Gandeng Gendong yang menyediakan berbagai macam makanan dan jajanan untuk dipasarkan secara luas, baik ke kelurahan, kampus, maupun secara daring (Iza & Nurhaeni, 2021).

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan ekstrem, *model Institutional Analysis and Development (IAD)* menjadi pendekatan yang sangat relevan karena kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional, yang tidak dapat diatasi hanya oleh pemerintah sendiri. IAD menawarkan kerangka analisis kelembagaan yang komprehensif, dengan mempertimbangkan bagaimana aktor-

aktor dari berbagai sektor seperti pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil berinteraksi dalam suatu situasi tindakan (*action situation*). Interaksi ini sangat dipengaruhi oleh aturan formal dan informal, kondisi biofisik, serta atribut komunitas yang ada (Ostrom, 2011). Studi Darmawan (2017) menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan sosial di Indonesia sangat bergantung pada struktur kelembagaan dan koordinasi antaraktor yang baik. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan kelembagaan seperti IAD dapat digunakan untuk memahami dan memperbaiki dinamika kolaborasi dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tingkat lokal. Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa IAD dapat diterapkan untuk menganalisis berbagai kebijakan sosial yang kompleks, termasuk kebijakan pengelolaan sumber daya bersama dan program sosial berbasis komunitas (Darmawan, 2017).

Pendekatan IAD telah diterapkan untuk menganalisis efektivitas program bantuan sosial di Indonesia. Studi ini menyoroti bagaimana struktur kelembagaan memengaruhi keberhasilan program pengentasan kemiskinan, dengan menekankan pentingnya aturan formal dan informal dalam interaksi antaraktor. Model IAD telah digunakan untuk memahami dinamika kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya bersama di berbagai konteks. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap bagaimana aturan, norma, dan interaksi antaraktor mempengaruhi hasil program kolaboratif seperti di daerah Gandeng Gendong (Iza, S. M., & Nurhaeni, I. D. A, 2021).

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian yang telah dilakukan berdasarkan model *IAD*, penelitian ini mengajukan proposisi bahwa efektivitas penanggulangan kemiskinan ekstrem bergantung pada koordinasi dan sinergi antaraktor dalam jaringan kebijakan publik. Dengan kata lain, semakin kuat hubungan antaraktor dan semakin tinggi tingkat kolaborasi dalam kebijakan publik, semakin besar kemungkinan program pengentasan kemiskinan ekstrem berhasil.

Penelitian menggunakan Analisis *Stakeholder* yang akan digunakan untuk memahami kepentingan dan keterlibatan masing-masing aktor dalam proses kolaborasi. Metode *Netmap* digunakan guna memetakan pola hubungan antaraktor dan mengidentifikasi aktor yang memiliki peran dominan dalam jaringan kebijakan.

Selain itu, *SWOT Analysis* akan diterapkan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas model kolaborasi. Terakhir, *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM) digunakan untuk menentukan strategi yang paling optimal dalam meningkatkan sinergi antaraktor dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dari penjelasan di atas maka, perlu dilakukannya penelitian mengenai **Model Kolaborasi Aktor Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Pemerintah Lokal**. Hal ini diperlukan untuk memahami model kolaborasi yang efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada kebijakan strategi penanggulangan kemiskinan yang ada pada pemerintahan lokal khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Siapakah aktor kunci yang mendominasi pada Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Pemerintah Lokal (Kabupaten Lampung Selatan)?
2. Siapakah aktor yang mempengaruhi dan yang paling berpengaruh pada model kolaborasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Pemerintah Lokal (Kabupaten Lampung Selatan)?
3. Bagaimana membangun kerjasama dengan model kolaborasi/*networking* yang efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan kebijakan strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem yang lebih efektif sesuai dengan peran tugas dan fungsi pemangku kepentingan di pemerintah lokal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan memperluas pemahaman tentang dinamika kolaborasi dan jaringan dalam konteks penanggulangan kemiskinan ekstrem di

Pemerintah Lokal Kabupaten Lampung Selatan. Identifikasi aktor kunci dan pengaruh mereka dalam implementasi kebijakan akan memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program. Selain itu, penelitian ini akan menguji teori-teori terkait kolaborasi/*networking*, serta mengaplikasikannya dalam konteks nyata penanganan kemiskinan ekstrem.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, Penelitian ini akan memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkontribusi secara langsung pada upaya lokal untuk menghentikan kemiskinan ekstrem. Penulis dapat memperluas pemahaman mereka tentang cara berbagai pihak bekerja sama dalam pemerintah lokal melalui penelitian ini. Selain itu, penulis dapat memperoleh kemampuan untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan menciptakan kebijakan publik yang berbasis bukti.
- b. Bagi Pemerintah, Penelitian ini akan membantu dalam pembuatan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan dengan memberikan arahan yang nyata. Pemerintah daerah dapat meningkatkan koordinasi antarinstansi serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan menemukan aktor kunci dan dinamika kolaborasi yang efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang kuat untuk meningkatkan program sosial, ekonomi politik saat ini dan meningkatkan dampak positifnya terhadap masyarakat yang membutuhkan.
- c. Bagi Akademisi, Penelitian ini akan meningkatkan pemahaman akademis dan literatur tentang kerja sama dan jaringan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Penemuan dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian tambahan di bidang kebijakan publik, administrasi publik, dan studi pembangunan. Selain itu, hasilnya dapat digunakan sebagai referensi dalam pengajaran dan diskusi akademis tentang upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi tidak hanya oleh negara terbelakang, negara sedang berkembang tetapi bahkan di negara maju sekalipun. Perbedaan hanya pada persentase tingkat kemiskinan dibandingkan jumlah penduduk suatu negara, indikator kemiskinan, dan cara penanggulangan yang menyesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Sebagai fenomena dalam administrasi publik, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan berbagai kebijakan atau cara yang disesuaikan dengan kondisi negara ataupun fenomena kemiskinan itu sendiri. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya terfokus pada satu cara namun bisa dengan banyak cara baik melalui program penanggulangannya, pemberdayaan masyarakatnya, aktor pelaksananya, maupun sistem kerjasamanya.

Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai bahan perbandingan atau studi. Hasil penelitian ini mencakup beberapa topik penelitian yang berkaitan dengan Model Kolaborasi, seperti berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun	Negara Studi	Judul	Metode	Hasil
1.	Tom Ongesa Nyamboga, Benson Omwario Nyamweya dan Gongera Enock George (2014)	Kenya	<i>An Assessment of Collaborative Development Based Approach on Poverty Reduction in Kenya: Case of Government and Civil Society Organizations.</i>	Studi literature	Upaya penanggulang an kemiskinan telah mampu menciptakan persepsi positif antara pemerintah dan masyarakat sipil. Konsultasi berbasis lokal menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan implementasi proyek

No	Penulis/Tahun	Negara Studi	Judul	Metode	Hasil
					pembangunan Hal ini menjadi dasar hubungan kerja yang lebih baik antara pemerintah dan aktor nonnegara termasuk masyarakat lokal. Namun dalam beberapa kasus tingkat dan kualitas partisipasi tampaknya dipengaruhi oleh waktu dan informasi yang tepat. Keterlibatan semua pihak dalam implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses kolaborasi antar aktor.
2.	Vidar Stevens dan Annika Agger (2017)	Denmark	<i>Managing Collaborative Innovation Networks Practical Lessons from a Belgian Spatial Planning Initiative</i>	Penelitian empiris pada jaringan inovasi kolaboratif.	Cara terbaik mengelola jaringan inovasi kolaboratif adalah tidak menekankan pada hasil, tetapi pada berinvestasi dalam membangun hubungan dan bersama menyepakati perencanaan serta langkah-langkah proses yang jelas. Pendekatan itu memungkinkan para aktor untuk saling mengenal dan kemudian berkembang pada pemahaman tentang tujuan, perilaku, niat mereka pada kegiatan kelompok yaitu membuat kebijakan yang radikal dan inovatif.
3.	P. Singh, Harpalsinh Chudasama/ 2020	India	<i>Evaluating poverty alleviation strategies in a developing country</i>	Kuantitatif	Melalui simulasi berbasis FCM, studi ini mengevaluasi efektivitas pendekatan pengentasan

No	Penulis/Tahun	Negara Studi	Judul	Metode	Hasil
					kemiskinan yang ada, termasuk pembiayaan mikro berbasis organisasi masyarakat, kemampuan dan jaminan sosial, berbasis pasar dan tata kelola yang baik. Temuan mengkonfirmasi, sampai batas tertentu, adanya saling melengkapi dari berbagai pendekatan pengentasan kemiskinan yang perlu dilaksanakan secara bersamaan untuk mencapai upaya pengentasan kemiskinan yang komprehensif. Simulasi berbasis FCM menggarisbawahi perlunya penerapan pendekatan terpadu dan multidimensi yang menggabungkan unsur-unsur dari berbagai pendekatan untuk mengentaskan kemiskinan, yang merupakan fenomena multidimensi. Selain itu, studi ini menawarkan implikasi kebijakan terhadap rancangan, pengelolaan, dan implementasi program pengentasan kemiskinan.
4.	Abdul Rasyid Sahar dan Rov Valiant Salomo (2018)	Indonesia	Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pinrang.	Metode deskriptif kualitatif	Bukti-bukti dari India Tidak optimalnya pembangunan dimensi trust, mutual understanding dan kapasitas pemimpin kolaborasi menjadi

No	Penulis/Tahun	Negara Studi	Judul	Metode	Hasil
					variabel penentu yang menghambat proses kolaborasi ke tingkat yang lebih iteratif dan dinamis
5.	Srilata Patnaik, C. Shambu Prasad/ 2021	India	<i>Coordination in multi-actor policy implementation: case study of a livelihood enhancement programme in India</i>	Kuantitatif	Peningkatan keterlibatan sejumlah aktor non-negara seperti LSM dan organisasi berbasis masyarakat (CBO) dalam program pengentasan kemiskinan. Hal ini memerlukan koordinasi yang lebih besar di antara para aktor agar program-program tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Artikel ini mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam implementasi kebijakan multi-aktor, dengan menggunakan studi kasus program peningkatan kehidupan pedesaan yang diterapkan di negara bagian Odisha di India. Temuan menunjukkan bahwa desain program, frekuensi interaksi, saling ketergantungan antar aktor, kredibilitas LSM, kepemimpinan dan sifat pribadi telah membantu dalam koordinasi antara negara, LSM dan CBO.
6.	Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. (2017)	Oman	<i>The penta helix model of innovation in Oman: An HEI perspective.</i>	Studi literatur dengan analisis model	Pendidikan tinggi kurang dilibatkan. Inovasi dapat lebih berkembang bila keterlibatan pendidikan tinggi

No	Penulis/Tahun	Negara Studi	Judul	Metode	Hasil
				Penta Helix.	lebih maksimal karena untuk membentuk budaya inovasi, jaringan inovasi yang efektif, maka kolaborasi antar aktor dalam Penta Helix yaitu akademisi, pemerintah, industri, LSM dan wirausahawan sosial harus ditingkatkan.
7.	B. Mubangizi/ 2008	Afrika Selatan	<i>Responses to poverty in post-apartheid South Africa: some reflections</i>	Kualitatif	Strategi yang tepat menurut peneliti adalah pendekatan ‘segala upaya’ yang melibatkan pengembangan masyarakat partisipatif, aksi sosial, perubahan kebijakan, dan kemitraan bersama antara masyarakat sipil, negara, dan sektor swasta.
8	Joshua N. Kaki, Prof. Dr. Y Ashok Kumar/ 2024	India	<i>The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) – Description and Evaluation of The Rural Employment Policy in India</i>	Kualitatif	Model MGNREGA memberikan pembayaran 100 hari kerja dan berdampak pada ketenagakerjaan di pedesaan India. MGNREGA tetap menjadi program kebijakan ketenagakerjaan yang penting dalam mengatasi kemiskinan di India.
9	Joko Tri Brata (2014).	Indonesia	<i>Collaborative Model in the Slum Program of the Kendari City</i>	Metode analisis kualitatif.	Konsep jaringan yang dimodelkan dalam penanggulangan kemiskinan adalah model hirarki dan oleh aktor TKPKD. Namun model tersebut tidak berhasil karena bersifat konvensional serta anggota jaringan tidak berfungsi optimal.
10	Khurshed Alam (2014)	Banglades	<i>Extending the Reach of</i>	Studi kasus dan	Meskipun kredit mikro belum mampu

No	Penulis/Tahun	Negara Studi	Judul	Metode	Hasil
			<i>Microcredit: A New Model for Poverty Alleviation through Livelihood Mapping in Bangladesh</i>	evaluasi penerapan program baru	mengentaskan kemiskinan, namun model kredit mikro ini memiliki manfaat signifikan dalam penanggulangan kemiskinan di Bangladesh.
11	Montri Kunphoommarl, Ph.D. & Sirinapa Kunphoommarl (2013)	Thailand	<i>Social Policy and Community Welfare Management for Poverty Reduction in Thai Experiences: An Implication for Asian Countries</i>	Studi kasus dengan pendekatan institusi.	Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus lebih terfokus pada upaya organisasi lokal sebagai agen perubahan dan transformasi pengetahuan dalam mengelola kesejahteraan masyarakat.
12	Nilan G. Yu (2014).	Filipina	<i>The Role of Social Work in Philippine Poverty Reduction Programs: Ideology, Policy, and the Profession.</i>	Analisis deskriptif kualitatif.	Peran pekerja sosial dalam program penanggulangan kemiskinan terbatas pada penyediaan langkah-langkah perbaikan, karena keberadaan pekerja sosial juga dibatasi oleh politik dan ekonomi Negara.

Sumber: disusun oleh penulis dari sumber akademis

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa penelitian yang telah dilakukan di luar negeri, di Indonesia bahkan di daerah-daerah umumnya mengkaji tentang upaya penanggulangan kemiskinan dari berbagai aspek sesuai dengan kondisi kemiskinan dan potensi yang dimiliki serta kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan berbagai pihak.

Namun belum ada yang meneliti tentang kolaborasi antar aktor pemerintahan daerah, antar aktor pemerintah dengan berbagai pihak seperti swasta, perguruan tinggi, pihak individu atau masyarakat miskin, dan media massa, dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Bahkan belum ada yang meneliti kolaborasi aktor dari perspektif *Institutional Analysis and Development* (IAD) Ostrom dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Perbedaan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan dalam lokus dan fokus kajian yang mendeskripsikan dan menganalisis proses kolaborasi antar aktor dalam hal ini aktor penanggulangan kemiskinan dalam TKPK yaitu pemerintah/OPD, swasta/bisnis, perguruan tinggi, serta aktor masyarakat dan media masa dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini juga menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat proses kolaborasi aktor tersebut. Selanjutnya kajian ini menemukan alternatif model kolaborasi antar aktor yang dapat dijadikan dasar dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, yaitu menawarkan perspektif *Institutional Analysis and Development* (IAD) dalam kolaborasi aktor.

Penelitian ini melihat model kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan landasan teori yang relevan dan menggabungkan beberapa teori penting. Ada dua teori yang digunakan yaitu, Teori Kebijakan Publik dan Teori Aktor dalam kebijakan publik. Teori kebijakan publik membahas bagaimana kebijakan dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam konteks pemerintahan serta bagaimana berbagai aktor dan faktor memengaruhi proses kebijakan. Sedangkan Teori aktor dalam kebijakan publik menekankan peran berbagai aktor dalam proses kebijakan, baik aktor negara (pemerintah) maupun non-negara (LSM, swasta, masyarakat sipil).

2.2 Kemiskinan

2.2.1 Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai kondisi di mana individu hidup dengan pendapatan di bawah USD 1,9 PPP per hari (*World Bank*, 2022). Dalam konteks Indonesia, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan, sandang, dan papan, meskipun telah menerima bantuan sosial (Bappenas, 2023). Faktor-faktor struktural seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi turut memengaruhi tingkat kemiskinan ekstrem di suatu daerah.

Berikut ditampilkan grafik gambar perkembangan data series persentase penduduk miskin, Indonesia, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2012—2023:

Grafik 4. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin

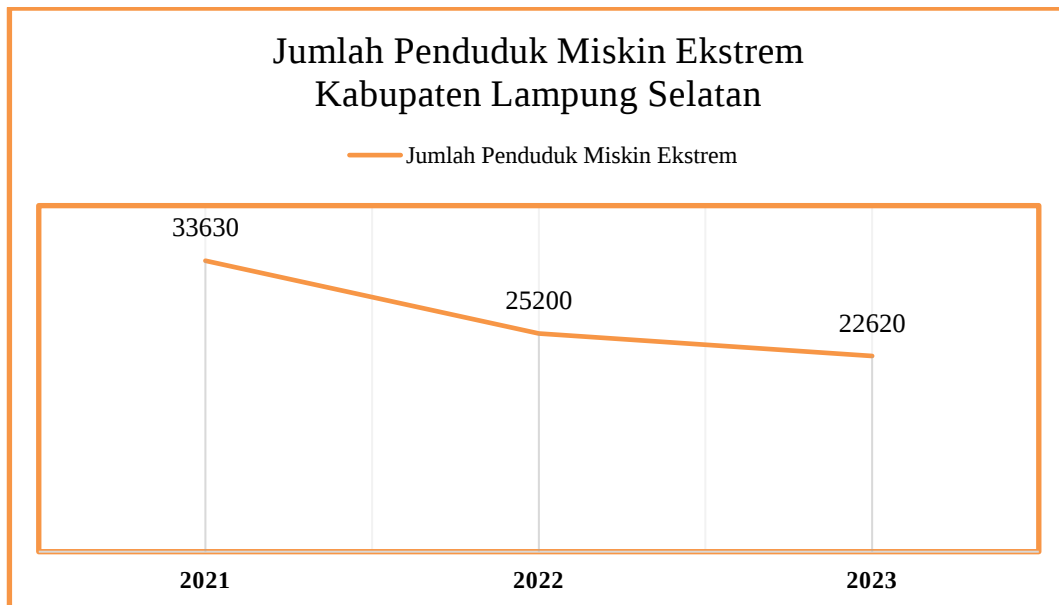


Sumber: BPS, 2024

Pada gambar di atas Kabupaten Lampung Selatan selama delapan tahun terakhir, untuk persentase jumlah penduduk miskin masih terus di atas Provinsi Lampung dan Nasional. Tentu saja meskipun mengalami penurunan angka kemiskinan namun masih belum bisa berada dibawah angka kemiskinan Provinsi dan Nasional. Terlihat pada tahun 2023 angka kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar 12,79% sedangkan Provinsi Lampung sebesar 11,11% dan besar angka kemiskinan Indonesia adalah 9,36%.

Selanjutnya untuk jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan masih cukup banyak yaitu sebanyak 22.620 jiwa atau setara dengan 2,16%. Angka persentase kemiskinan ekstrem itu jelas masih sangat jauh dari target kemiskinan Indonesia yang tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebesar 0% di tahun 2024. Grafik jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan selama 3 tahun (2021—2023) di tampilkan pada Grafik 3. berikut:

Grafik 5. Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: BPS 2024

Dalam konteks pembangunan sosial, kemiskinan ekstrem bukan hanya permasalahan ekonomi, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan sosial dan eksklusi dari akses terhadap sumber daya produktif. Hal ini membuat pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan media, menjadi sangat penting dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan.

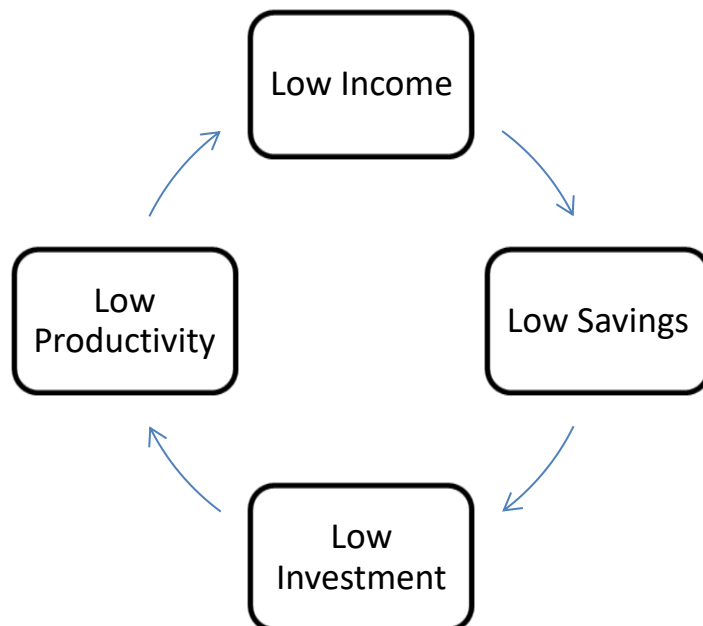
Penanggulangan kemiskinan ekstrem membutuhkan strategi yang tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Oleh karena itu, pemetaan aktor yang berkontribusi dalam tata kelola kolaborasi menjadi bagian penting dalam memahami dinamika program pengentasan kemiskinan ekstrem yang efektif.

2.2.2 Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah suatu negara harus menerapkan kebijakan penting untuk memerangi kemiskinan. Karena kemiskinan atau ketidakmampuan seseorang, keluarga, atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dapat menyebabkan masalah sosial lainnya yang akhirnya menyebabkan kemiskinan lagi, menciptakan sebuah lingkaran yang disebut "lingkaran setan kemiskinan".

Vicious circles of poverty (lingkaran setan kemiskinan) adalah istilah yang sering diungkapkan dalam Ilmu Ekonomi yang menggambarkan produktivitas yang rendah akan menghasilkan pendapatan yang rendah, selanjutnya akan membuat *saving*, *demand*, dan *supply* yang rendah dan diteruskan dengan investasi yang juga rendah, karena pendapatan yang rendah tersebut, si miskin akan kekurangan makan, karena kekurangan makan akan membuat dia sakit, dan akan kembali membuat produktivitas yang rendah. Semuanya terus berputar, oleh sebab itu disebut sebagai Lingkaran Setan Kemiskinan.

Vicious circles of poverty (Lingkaran Setan Kemiskinan) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. *Vicious circles of poverty* (Ragnar Nurkse, 1944)

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Ekstrem di Indonesia, secara nasional pemerintah telah membuat kebijakan dengan menetapkan strategi nasional penanggulangan kemiskinan ekstrem yang tercantum pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dokumen ini menjadi arah bersama bagi pemerintah, swasta, masyarakat dan berbagai pihak dalam mendorong gerakan nasional penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 telah ditetapkan tiga strategi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu pengurangan beban pengeluaran rakyat, peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

2.3 Kebijakan Publik

2.3.1 Aktor dalam Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh berbagai aktor yang memiliki kepentingan, sumber daya, dan pengaruh dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Teori aktor dalam kebijakan publik menekankan bahwa kebijakan merupakan hasil interaksi berbagai aktor yang membentuk jaringan kebijakan (*policy network*) dalam suatu sistem tata kelola (*governance*). Menurut Sabatier dan Weible (2014) dalam teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF), aktor kebijakan dapat terdiri dari kelompok yang memiliki keyakinan dan kepentingan serupa dalam memperjuangkan suatu kebijakan tertentu.

Selain itu, Rhodes (1997) dalam konsep *Policy Network Theory* menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya dikelola oleh birokrasi pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai aktor non-pemerintah seperti sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Setiap aktor memiliki sumber daya yang berbeda-beda, baik dalam bentuk kekuasaan regulasi, keuangan, maupun keahlian teknis. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada tingkat koordinasi, kolaborasi, dan negosiasi antaraktor dalam jaringan kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan publik, banyak aktor yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti politik, birokrasi, dan masyarakat sipil, akademisi dan masing-masing berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Politikus, sebagai pembuat keputusan, seringkali memiliki pandangan strategis yang mengarah pada tujuan jangka panjang, sementara birokrasi berperan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara teknis dan operasional. Di sisi lain, masyarakat sipil, yang terdiri dari organisasi non-pemerintah, kelompok masyarakat, dan individu, juga memiliki peran dalam memengaruhi kebijakan melalui partisipasi, advokasi, atau sebagai penerima langsung dari kebijakan tersebut.

Kemudian akademisi dan aktor lainnya akademisi dan peneliti juga memberikan kontribusi penting dalam menilai efektivitas kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, yang lainnya seperti media massa dapat mempengaruhi opini publik dan mendukung legitimasi kebijakan, sementara sektor swasta seringkali terlibat dalam penyediaan layanan atau sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan.

Aktor sosial yang terampil secara sosial memanfaatkan berbagai sumber otoritas, termasuk otoritas politik, untuk memungkinkan perubahan atau stabilitas dalam intervensi layanan publik. Mereka beroperasi dalam sistem yang kompleks dan multilevel, yang dikenal sebagai *Strategic Action Fields* (SAFs), untuk mempengaruhi implementasi kebijakan (Moulton & Sandfort, 2017). Selain itu menurut Verschuere (2009) Birokrasi memainkan peran penting dalam menerjemahkan kebijakan publik yang abstrak menjadi program yang berfungsi. Meskipun aktor politik menetapkan kebijakan, mereka sering kali mengandalkan birokrasi untuk implementasi sehari-hari, yang dapat melibatkan pengawasan dan evaluasi kinerja agensi publik (Verschuere, 2009). Menurut Pressman dan Widavsky (1984) kegagalan implementasi juga sering kali terjadi karena kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, Birokrasi memiliki tugas untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam program-program konkret dan memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan aturan yang ada.

Kemudian dalam implementasi kebijakan sering kali melibatkan koordinasi antara aktor publik dan swasta. Faktor-faktor seperti struktur ekonomi politik suatu negara dan pengeluaran sebelumnya pada kebijakan pasar tenaga kerja aktif dapat mempengaruhi pengaturan tata kelola yang diadopsi untuk implementasi kebijakan (Trein & Tosun, 2019). Memahami dimensi politik dari implementasi kebijakan sangat penting. Ini melibatkan pengelolaan kelompok pemangku kepentingan yang berbeda, seperti politik kelompok kepentingan, politik birokrasi, dan politik kepemimpinan, untuk meningkatkan peluang pencapaian tujuan kebijakan (Campos & Reich, 2019). Implementasi kebijakan sering kali lebih kompleks daripada yang terlihat, melibatkan berbagai aktor yang menerjemahkan kebijakan di bawah kondisi

yang bervariasi. Perubahan dalam lingkungan layanan publik, baik yang bertahap maupun yang mengganggu, menambah kompleksitas ini (Carey *et al.*, 2019).

Menurut Jones (Meutia, 2017), ada empat golongan aktor:

- a. Golongan Rasionalis: Mereka selalu menggunakan metode dan langkah-langkah dalam melakukan pilhan alternatif kebijaksanaan. Mereka melakukan ini dengan mengidentifikasi masalah, membuat tujuan dan menyusunnya dalam jenjang tertentu, mengidentifikasi semua alternatif kebijaksanaan, meramalkan atau memprediksi akibat dari tiap alternatif, dan membandingkan akibat-akibat dari masing-masing alternatif.
- b. Golongan Teknis: Seorang teknisi pada dasarnya adalah seorang rasionalis karena ia terlibat dalam beberapa tahapan proses kebijaksanaan karena bidang keahliannya atau spesialisasi mereka. Teknisi mungkin memiliki banyak kebebasan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi hanya dalam batas pekerjaan dan keahlian mereka. Mereka biasanya bekerja pada proyek yang membutuhkan keahliannya, tetapi biasanya orang lain yang menentukan apa yang harus mereka lakukan
- c. Golongan Inkrementalis: Para politisi dan aktor inkrementalis adalah jenis yang sama. Menurut golongan inkrementalis, tahap-tahap kemajuan kebijaksanaan dan implementasinya adalah suatu proses penyesuaian yang terus menerus terhadap hasil akhir dari tindakan tertentu. Hasil akhir ini dapat berupa hasil jangka pendek atau jangka panjang. Kita tidak akan pernah memiliki cukup informasi dan pengetahuan untuk membuat program kebijaksanaan yang lengkap untuk golongan inkrementalis. Mampu melakukan tawar-menawar atau bargain adalah ciri dari gaya kerja inkrementalis ini.
- d. Golongan Reformis (Pembaharu): Karena pentingnya masalah yang dihadapi, mereka dipaksa untuk fokus pada tindakan segera. Para *lobbyist* biasanya menggunakan pendekatan ini. Nilai-nilai yang mereka junjung tinggi terkait dengan perjuangan untuk perubahan sosial, kadang-kadang demi perubahan sosial itu sendiri, tetapi lebih sering terkait dengan kepentingan kelompok tertentu. Dalam kebanyakan kasus, tujuan kebijaksanaan ditetapkan di dalam kelompok-kelompok tersebut melalui

berbagai proses, termasuk keyakinan pribadi bahwa hasil tindakan pemerintah saat ini telah melenceng atau bahkan gagal (Meutia, 2017).

Empat Golongan Aktor Menurut (Thompson, 1990):

- a. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai Pemain Kunci (*Key Players*). Aktor ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh termasuk dalam mengevaluasi strategi baru.
- b. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang rendah tetapi memiliki kekuatan (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai pendukung (*contestsetters*). Aktor ini dapat mendatangkan resiko sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik. Aktor ini dapat berubah menjadi keyplayers karena suatu peristiwa. Hubungan baik dengan stakeholder ini terus dibina. Untuk itu segala informasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan sehingga mereka dapat terus berperan aktif dalam pencapaian tujuan (Thompson, 1967).
- c. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang tinggi tetapi memiliki kekuatan (*power*) yang rendah diklasifikasikan sebagai Subyek (*Subjects*). Aktor ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan aktor lainnya. Aktor ini sering bisa sangat membantu sehingga hubungan dengan aktor ini harus tetap dijaga dengan baik.
- d. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) yang rendah diklasifikasikan pengikut lain, untuk melibatkan aktor ini lebih jauh karena kepentingan dan

Ada berbagai pihak yang berpartisipasi dalam proses kebijakan. Aktor-aktor ini tentunya bertanggung jawab atas peran yang mereka mainkan. Dalam hal ini, aktor terdiri dari *Official Actor* dan *Unofficial Actor*. Kedua jenis aktor memiliki peran yang berbeda. *Official Actor* berasal dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang berfungsi sebagai lembaga sah yang memiliki otoritas atas kebijakan publik (Agustino, 2016).

Dalam konteks penelitian ini, teori aktor sangat relevan dalam menganalisis model kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di pemerintah lokal. Kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan berbagai aktor dalam penyelesaiannya. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus berkolaborasi dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat lokal.

Dalam jaringan kebijakan publik, penting untuk membedakan antara aktor kunci (*key actors*) dan aktor berpengaruh (*influential actors*). Aktor kunci merupakan pihak yang memiliki legitimasi formal dan kapasitas strategis dalam pengambilan keputusan, seperti instansi pemerintah utama atau lembaga yang memegang kendali atas sumber daya dan kebijakan (Howlett, Ramesh, & Perl, 2009). Sementara itu, aktor berpengaruh bisa saja berasal dari luar struktur resmi pemerintahan, namun memiliki kekuatan yang signifikan dalam membentuk opini publik, memobilisasi dukungan, atau mempengaruhi arah kebijakan secara tidak langsung. Mereka bisa berupa tokoh masyarakat, media, organisasi masyarakat sipil, bahkan sektor swasta. Dalam konteks kolaborasi, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada seberapa kuat sinergi antara aktor kunci yang memiliki otoritas dan aktor berpengaruh yang memiliki jangkauan dan daya dorong terhadap perubahan (Sabatier & Weible, 2014). Oleh karena itu, memahami peta kekuasaan dan kepentingan kedua tipe aktor ini menjadi hal yang esensial dalam merancang strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem yang inklusif dan efektif.

2.3.1.1 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Lampung Selatan dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No:B/59/V.01/HK/2024, pada bulan Januari 2024. Dengan keanggotaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pihak swasta sebagai *corporate social responsibility* (CSR) dan perguruan tinggi.

Sejak terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka istilah SKPD (satuan

kerja perangkat daerah) berubah menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Hal itu berpengaruh terhadap istilah yang digunakan dalam tim penanggulangan kemiskinan, sehingga diterbitkan Surat Keputusan Bupati No:B/59/V.01/HK/2024 tanggal Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut:

**Susunan Personalia
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024**

Penanggung Jawab	: Bupati Lampung Selatan
Ketua	: Wakil Bupati Lampung Selatan
Wakil Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Sekretaris	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Wakil Sekretaris	: 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan 2. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Koordinator	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Anggota	:1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan 4. BPS 5. PLN 6. BULOG 7. Lampung Post 8. Radar Lampung Selatan 9. Tribun Lampung Selatan 10. Media Berita Kita
Koordinator	: Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Usaha Mikro dan
Kecil
Anggota

1. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kepala Dinas Perhubungan
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
10. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
12. BANK LAMPUNG
13. Perempuan Anak Lingkungan Usaha Mikro dan Agribisnis (PALUMA)
14. KADIN Lampung Selatan
15. PDAM
16. STIH Muhammadiyah Kalianda
17. STIE Muhammadiyah Kalianda

Sekretariat
Kepala

: Sekretaris Badan Perencanaan Wakil Kepala Anggota Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Wakil Kepala

: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Anggot

1. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4. Fungsional Perencana Bidang Sosial dan Pemerintahan
5. Unsur Staf Pelaksana PNS
6. Unsur Pelaksana Non PNS (THLS)

2.3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Selatan

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Selatan memiliki tugas pokok dan fungsi yang tertera pada SK Bupati Lampung Selatan Nomor: B/59/V.01/HK/2024 sebagai berikut:

a. Tugas:

Melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan.

b. Fungsi:

1. Menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi kabupaten;
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan RPKD Kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
4. Memfasilitasi pengembangan Penanggulangan Kemiskinan; kemitraan bidang
5. Menyusun instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Mengelola pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan; dan
7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Selain itu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Selatan juga mempunyai tata kerja sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/59/V.01/HK/2024 sebagai berikut:

1. Tata Kerja TKPK Kabupaten Lampung Selatan dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan
2. Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Aksi Tahunan, dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

3. Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan
4. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam model kolaborasi aktor berbasis *Institutional Analysis and Development* (IAD), peran utama pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah sebagai aktor kunci dalam *arena aksi* (action arena) yang berfungsi mengoordinasikan interaksi antar berbagai pemangku kepentingan. Aktor-aktor lain seperti NGO, sektor swasta, organisasi internasional, serta masyarakat sipil turut memainkan peran dalam *situasi aksi* melalui kontribusi berupa pendanaan, inovasi kebijakan, serta pelaksanaan program berbasis komunitas. Model IAD yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom memandang kebijakan publik sebagai hasil interaksi kompleks antaraktor dalam suatu sistem kelembagaan yang dipengaruhi oleh tiga elemen utama: karakteristik biofisik, atribut komunitas, dan aturan yang berlaku (*rules-in-use*) (Ostrom, 2011).

Permasalahan kemiskinan ekstrem yang bersifat multidimensional menuntut adanya pemahaman terhadap bagaimana aktor-aktor dengan kepentingan berbeda berinteraksi di dalam arena aksi, serta bagaimana pola interaksi tersebut membentuk hasil kebijakan. Dalam kerangka IAD, penting untuk menganalisis pola interaksi (*patterns of interaction*) yang mencerminkan kerja sama, konflik, negosiasi, dan aliansi strategis antaraktor. Interaksi ini selanjutnya akan berdampak pada hasil (*outcomes*) yang dapat dievaluasi menggunakan sejumlah kriteria seperti efektivitas, efisiensi, dan keadilan distribusi (Kiser & Ostrom, 1982; Ostrom, 2010).

Dengan demikian, pendekatan IAD memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami kolaborasi lintas sektor dalam kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem. Analisis terhadap arena aksi dan kondisi struktural di sekitarnya memungkinkan pemerintah daerah merancang strategi yang mempertimbangkan

kekuatan, kepentingan, serta insentif masing-masing aktor. Evaluasi terhadap hasil kebijakan juga menjadi bagian penting dari proses ini, guna memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab permasalahan kemiskinan secara berkelanjutan.

Selain itu, keberhasilan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan kolaboratif sangat bergantung pada desain kelembagaan (*institutional arrangements*) yang membentuk kerangka aturan, norma, dan struktur interaksi antaraktor. Dalam kerangka *Institutional Analysis and Development* (IAD) yang dikembangkan oleh Ostrom (2011), sistem kelembagaan yang baik memungkinkan partisipasi aktif berbagai aktor dalam *arena aksi* melalui mekanisme yang mendorong koordinasi, negosiasi, dan pembagian tanggung jawab secara proporsional. Keberadaan aturan yang berlaku (*rules-in-use*), baik formal maupun informal, menjadi faktor penentu dalam membentuk insentif dan perilaku aktor dalam mengambil keputusan serta menjalankan peran mereka dalam penanggulangan kemiskinan (Ostrom, 2010).

Proses kolaborasi yang efektif dalam arena aksi akan menghasilkan pola interaksi yang mencerminkan adanya saling ketergantungan, kepercayaan, dan akuntabilitas antaraktor. Hasil-hasil antara (*intermediate outcomes*), seperti peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor, merupakan indikator penting menuju keberhasilan jangka panjang kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem. Evaluasi terhadap pola interaksi dan hasil kebijakan dilakukan melalui kriteria evaluatif (*evaluative criteria*), seperti efisiensi, efektivitas, inklusivitas, dan keadilan (Kiser & Ostrom, 1982). Dengan demikian, Model IAD tidak hanya berperan dalam menjelaskan dinamika kerja sama antaraktor, tetapi juga memberikan kerangka konseptual yang sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan prosedural yang mendukung maupun menghambat keberhasilan kolaborasi dalam mengatasi kemiskinan ekstrem.

2.3.2 Hubungan Antar Aktor

Berbagai aspek implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tipe kebijakan, aktor (badan atau instansi) yang bertanggung jawab, dan hubungan antar aktor. Tipe

kebijakan memengaruhi seberapa sulit implementasi, sedangkan aktor (pelaksana) dan hubungan antar aktor memengaruhi keberhasilan kebijakan secara langsung (Mahmud, 2020)

Umumnya penjelasan mengenai aktor dan pola hubungan mereka menggunakan teori-teori yang dipinjam dari disiplin ilmu organisasi, psikologi dan ilmu politik. Istilah disposisi (kepatuhan) misalnya digunakan untuk menggambarkan sikap mental aktor pelaksana terhadap kebijakan yang harus diimplementasikan. Interest (kepentingan) digunakan untuk menggambarkan tentang hubungan emosi dalam wujud kepentingan (apapun itu) dalam implementasi kebijakan. Hal itu akan mempengaruhi cara implementor melaksanakan tugasnya.

Dinamika hubungan antar aktor/instansi/organisasi/lembaga dalam implementasi kebijakan dibahas oleh semua teori implementasi meski dengan intensitas dan sebutan berbeda, mengingat sangat jarang kebijakan yang hanya diimplementasikan oleh organisasi tunggal. Bardach memasukkannya sebagai bagian yang harus diperhatikan dalam “*scenario writing* proses implementasi”; Van Meter dan Van Horn membahasnya dalam “penguatan dan komunikasi inter organisasi”; Edwards III membahasnya dalam “struktur birokrasi”, Sabatier dan Mazmanian membahasnya dalam *ertical* “Kemampuan Kebijakan menstrukturkan implementasi”; Grindle membahasnya dalam “kedudukan Pengambil Keputusan” dan dalam “kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat”. Mereka memberikan perhatian terhadap pentingnya pengaruh hubungan antar aktor / organisasi dari perspektif pembuat kebijakan (*top-down*), yang memandang bahwa hubungan antar aktor berpotensi menimbulkan kerumitan, bukan sebagai ertic yang dapat mendukung keberhasilan implementasi.

Secara umum menurut Dye (2013) aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik dibagi dalam dua katagori besar yaitu: *actor inside government* dan *actor outside government*.

1. *Actor inside government* dalam konteks negara Indonesia (bisa jadi berbeda dengan negara-negara lain) meliputi:

- a. Eksekutif (presiden, staf penasihat presiden, para menteri, para kepala daerah) yang umumnya merupakan pejabat politis.
- b. Anggota-anggota dari badan perwakilan rakyat (Legislatif/ DPR & MPR)
- c. Badan dan orang-orang Yudikatif secara parsial
- d. Birokrasi mulai dari sekwilda, kepala kantor wilayah sampai level terbawah (*street level bureaucrat*)

2. *Actor Outside Government* meliputi:

- a. Kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) yang bisa berwujud LSM (NGO), kelompok/ ikatan profesional, kelompok bisnis, perserikatan buruh, bahkan organisasi atau lembaga keagamaan.
- b. Akademisi, peneliti dan konsultan, pihak swasta (perusahaan yang memberikan layanan sesuai permintaan pemerintah)
- c. Politisi
- d. Media massa
- e. Opini publik
- f. Kelompok Sasaran Kebijakan (*beneficiaries*)

2.3.3 Peran Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Publik

Pemerintah daerah merupakan entitas pemerintahan yang berperan dalam menjalankan fungsi administratif dan pelayanan publik di tingkat lokal dalam sistem desentralisasi. Menurut Rondinelli dan Cheema (1983), desentralisasi adalah proses transfer kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki karakteristik utama seperti otonomi dalam pengambilan keputusan, kemandirian fiskal, serta tanggung jawab dalam pembangunan ekonomi dan sosial di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola urusan pemerintahan yang bersifat konkuren sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-

masing daerah (Mote, 2020). Terdapat 4 peran pemerintah dalam tata kelola publik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara otonom sesuai aspirasi dan peraturan perundang-undangan
- b. Membuat kebijakan daerah, seperti Perda untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik
- c. Mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat
- d. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah

Dalam kebijakan sosial, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang strategis. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial, termasuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin. Pemerintah daerah juga diberikan wewenang dalam mengalokasikan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa. Selain itu, kebijakan afirmatif seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga menjadi instrumen yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan ekstrem memiliki variasi pendekatan berdasarkan konteks sosial dan ekonomi masing-masing wilayah. Studi yang dilakukan oleh Bebbington *et al.* (2008) menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang, pendekatan berbasis partisipasi masyarakat menjadi strategi efektif dalam pengentasan kemiskinan (Bebbington & Foo, 2008). Di Indonesia, berbagai daerah telah mengembangkan model kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan, seperti Program Desa Mandiri yang diterapkan di beberapa kabupaten untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin melalui pemberdayaan usaha mikro dan koperasi. Selain itu, di daerah perkotaan, kebijakan berbasis perumahan layak dan

peningkatan akses layanan kesehatan menjadi fokus utama dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan nasional, inisiatif lokal, serta partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta (Bappenas, 2020).

Pemerintah lokal memiliki peran krusial dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, terutama karena kedekatannya dengan masyarakat dan kemampuannya dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Menurut Rondinelli dan Cheema (2003), desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin. Pemerintah lokal dapat bertindak sebagai fasilitator, regulator, dan eksekutor dalam berbagai program kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem. Pemerintah lokal juga memiliki peran dalam menciptakan kebijakan ekonomi inklusif yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan kewirausahaan bagi masyarakat miskin. Studi yang dilakukan oleh Todaro dan Smith (2020) menegaskan bahwa kebijakan ekonomi berbasis lokal, seperti pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Dengan mendukung akses permodalan, pelatihan keterampilan, dan jaringan pasar, pemerintah daerah dapat membantu masyarakat miskin meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan.

Namun, berbagai tantangan masih dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem oleh pemerintah lokal. Bebbington *et al.* (2008) mencatat bahwa keterbatasan sumber daya, kapasitas kelembagaan, serta masalah birokrasi sering kali menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.

Dengan demikian, pemerintah lokal memiliki peran yang sangat strategis dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui berbagai kebijakan dan program berbasis lokal. Keberhasilan upaya ini bergantung pada kombinasi antara kebijakan yang tepat, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta peningkatan

kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, reformasi kebijakan dan penguatan tata kelola pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas intervensi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.

2.4 Kolaborasi

Istilah *kolaborasi*, yang berasal dari kata *collaboration*, mulai dikenal sejak abad ke-19 seiring dengan berkembangnya industrialisasi dan semakin kompleksnya organisasi. Saat itu, pembagian kerja makin terstruktur, dan kebutuhan untuk bekerja sama antarindividu atau antarlembaga pun makin besar. Secara umum, kolaborasi dipahami sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih. Namun dalam praktiknya, banyak orang belum benar-benar memahami seperti apa hubungan yang bisa disebut sebagai kolaborasi. Akibatnya, istilah ini kerap digunakan secara keliru, bahkan disalahartikan sekadar kerja sama biasa, tanpa memperhatikan unsur saling percaya, kesetaraan, dan tujuan bersama yang seharusnya menjadi inti dari kolaborasi itu sendiri.

2.4.1 Kolaborasi Antaraktor dalam Kebijakan Publik

Kolaborasi antaraktor dalam kebijakan publik merujuk pada kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi permasalahan publik. Kolaborasi ini menekankan partisipasi, distribusi peran, kesetaraan dalam pengambilan keputusan, serta koordinasi berkelanjutan antar pihak. Kolaborasi yang efektif menuntut adanya kepercayaan, komunikasi terbuka, dan komitmen kelembagaan

Kolaborasi dalam kebijakan publik merupakan pendekatan yang menekankan kerja sama antara berbagai aktor, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil, dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan secara bersama-sama. Model kolaborasi ini berupaya mengatasi keterbatasan pendekatan birokratis tradisional yang sering kali terfragmentasi dan kurang responsif terhadap kompleksitas permasalahan sosial.

Bob Williams (2013) menguraikan perbedaan antara kolaborasi, koordinasi dan kooperasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. Bentuk Kolaborasi Berdasarkan Tujuan, Struktur, Proses dan Sumber

Level	Purpose	Structure	Process	Resources
<i>Networking</i>	• Provide dialogue and common understanding • Mutual exchange to support eachothers' efforts • Clearing house for infomation • Create clearing house for information • Create base of support	• Nonhierarchical • Loose/flexible link • Roles are loosely defined • Community action is primary link among members	• Low-key leadership • Minimal decision making • Little conflict • Informal Communication	• Variable time • Minimal skill • Minimal support • Minimal finance
<i>Cooperation</i>	• Match needs and provide coordination • Limit duplication of services • Ensure that tasks are done • Limited joint problem solving	• Central team acts as communication hub • Semi-formal links • Links are advisory • Group seeks to influence decision making	• Leaders who facilitate • Perhaps some conflict • Formal Communication within the central team	• Variable time • Medium skill • Medium support • Variable finance
<i>Coordination</i>	• Share resources to address common issues • Link resources to achieve joint goals • Merge resource base to create something new • More complex problem solving	• Central team consists of decision makers • Roles are defined • Links are formalised • Group participates in decision making	• Autonomous leadership focused on issue • Central and subgroup decision making • Frequent and clear communication	• Medium to high time • Some skills at high level • High support • Variable finance

<i>Collaboration</i>	• <i>Shared vision and goals</i> • <i>Build interdependent system to address issues and opportunities</i> • <i>Complex problem solving</i> • <i>Share resources</i>	• <i>Consensus is used in shared decision making</i> • <i>Roles, time, and evaluation are formalised</i> • <i>Links are formal and written into agreements</i> • <i>Group is a decisionmaking structure</i>	• <i>High leadership, trust level, and productivity</i> • <i>Ideas and decisions equally shared</i> • <i>Highly developed communication</i>	• <i>High time</i> • <i>Complex skills at high level</i> • <i>High levels of support</i> • <i>Variable finance</i>
----------------------	--	--	---	---

Sumber: Bob Williams dalam *A Review of Collaborative Relationships Between Government Agencies and Community Organisations*, 2003.

Bentuk kerjasama tergantung pada tujuan (*purpose*) kerjasama dilakukan, bagaimana proses (*process*) penerapannya, bagaimana strukturnya (*structure*) dan bagaimana pengelolaan sumber daya (*resources*) dari pihak yang bekerjasama tersebut. Semakin detail rincian tahapan kerjasama, semakin kuat hubungan kedua pihak yang bekerjasama.

Salah satu kerangka teoritis yang relevan dalam memahami dinamika kolaborasi dalam kebijakan publik adalah *Model Institutional Analysis and Development* (IAD) yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom. Model ini menawarkan perspektif sistematis untuk menganalisis bagaimana institusi (formal maupun informal), atribut komunitas, dan kondisi biofisik memengaruhi perilaku kolektif dan pengambilan keputusan di antara para aktor dalam suatu arena tindakan (*action situation*) (Ostrom, 2011).

Komponen pertama dalam model IAD adalah konteks eksternal, yang mencakup tiga aspek utama: kondisi biofisik, aturan kelembagaan (*rules-in-use*), dan atribut komunitas. Dalam konteks kebijakan publik, hambatan terhadap kolaborasi bisa muncul dari regulasi yang kaku, perbedaan kepentingan antar instansi, atau keterbatasan sumber daya yang tersedia. Sebaliknya, peluang dapat ditemukan dalam bentuk kesamaan visi, dukungan politik, dan modal sosial yang tinggi di antara pemangku kepentingan (Darmawan, 2017).

Komponen kedua adalah situasi tindakan, yaitu ruang interaksi antara aktor-aktor yang terlibat. Di dalam arena ini terjadi proses komunikasi, negosiasi, dan pengambilan keputusan. Model IAD memberikan ruang untuk menganalisis bagaimana aktor berperan, berinteraksi, dan saling memengaruhi dalam menghasilkan kebijakan atau program yang disepakati bersama. Proses deliberatif dan komunikasi yang terbuka menjadi aspek penting dalam memastikan kesetaraan peran antaraktor.

Komponen ketiga adalah hasil (*outcomes*) dari proses kolaborasi, yang dapat dilihat dari segi efektivitas kebijakan, efisiensi sumber daya, keadilan distribusi manfaat, serta keberlanjutan program. Kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing aktor, serta keberadaan mekanisme monitoring dan evaluasi, menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan implementasi dan keberlanjutan kerja sama. Model IAD juga mengakomodasi adanya mekanisme umpan balik (*feedback loop*), di mana hasil dari kebijakan akan memengaruhi kembali struktur kelembagaan dan perilaku aktor dalam jangka panjang (Ostrom, 2011; Chua & Yau, 2022).

Dengan demikian, model IAD tidak hanya berguna untuk memahami proses kolaborasi dalam kebijakan publik, tetapi juga menyediakan kerangka evaluatif yang dapat digunakan untuk menilai kualitas interaksi dan hasil yang dihasilkan oleh kolaborasi tersebut.

2.4.2 Pendekatan Kolaborasi dalam Pemerintahan Daerah

Pendekatan kolaborasi dalam pemerintahan daerah menekankan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Menurut Ansell dan Gash (2008), kolaborasi sektor publik terjadi ketika berbagai aktor dengan kepentingan berbeda bekerja bersama secara sinergis dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Dalam konteks pemerintahan daerah, pendekatan ini memungkinkan pemecahan masalah kompleks, seperti kemiskinan ekstrem, melalui koordinasi sumber daya, berbagi informasi, dan perumusan kebijakan yang lebih inklusif. Model kolaborasi yang efektif memerlukan faktor-faktor seperti kepercayaan antaraktor,

kepemimpinan fasilitatif, serta mekanisme komunikasi yang terbuka dan partisipatif.

Beberapa negara berkembang telah menerapkan model kolaborasi dalam kebijakan pemerintah daerah dengan hasil signifikan. Misalnya, di Brasil, program *Participatory Budgeting* yang diterapkan di Porto Alegre memungkinkan warga terlibat langsung dalam pengambilan keputusan anggaran daerah, sehingga kebijakan sosial menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin (Wampler, 2010). Selain itu, di India, inisiatif *Kerala People's Campaign for Decentralized Planning* melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal, yang telah meningkatkan partisipasi warga dan efektivitas program pembangunan (Heller *et al.*, 2007). Sementara itu, di Afrika Selatan, program *Community Work Programme* merupakan kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal untuk menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proyek-proyek yang dipilih dan dikelola bersama (Philip, 2013). Studi kasus ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pemerintahan daerah dapat memperkuat efektivitas kebijakan publik, termasuk dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di tingkat lokal seperti di Kabupaten Lampung Selatan.

2.4.3 Kolaborasi dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan *multivariable*, dan menurut itu, transformasi mengharuskan pendekatan terintegrasi dari semua struktural yang bertanggung jawab untuk kebijakan, kolektif, dan baik disiplin menjaga dari berbagai sidang untuk menanggulangnya. Izin yang dialokasikan oleh para pihak bertanggung jawab untuk perundingan duduk bersama membentuk Penanggulangan Kemiskinan Tim Koordinasi. Tim Penanggulangan Kemiskinan merupakan orang yang mendekati hanya dengan posisi bisnis, akademik, dan swasta. Berkaitan dengan membuat anggaran dan program kegiatan yang memungkinkan dan penjadwalan dan pengawasan dari realisasi masalah-masalah yang signifikan pada beberapa tingkatan integratif untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan diperhatikan. Bentuk kerjasama mempengaruhi hasil pra-seleksi.

Kolaborasi yang mengandung unsur demokratis Imperial memastikan semua kepentingan terwakili dan tidak ada monopoli aktor dalam proses kerjasamanya. Sejalan dengan *governance* yang membuka kelompok pebisnis swasta ke ruang publik dan menyalurkan mekanisme kepada negara (Bevir, 2006). Diperlukan kolaborasi dalam kebijakan. Karena kebijakan penanggulangan kemiskinan melibatkan aktor dengan kapasitas dan fungsionalitas yang berbeda.

Sehingga memerlukan hubungan yang lebih rinci menyangkut intensitas hubungan antar aktor, penyamaan persepsi, komitmen untuk bekerjasama mulai dari tahap awal proses kerjasama sampai pada penilaian capaian kegiatan bersama tersebut. Sebagaimana Joan M. Robert (2004) menyatakan bahwa intensitas hubungan, komitmen tiap aktor, visi misi dan kepentingan aktor, serta kapasitas sumber daya yang dimiliki menghasilkan bentuk kerjasama yang berbeda. Bentuk kerjasama koordinasi memiliki keterbatasan yang dapat diatasi dengan bentuk kolaborasi. Intensitas hubungan dan komitmen aktor dalam koordinasi lebih lemah daripada dalam kolaborasi. Sehingga ketika muncul masalah ataupun konflik antar aktor, maka koordinasi akan terhambat.

2.5 Teori Tata Kelola (*Governance Theory*)

Teori tata kelola (*governance theory*) berkembang sebagai pendekatan yang menyoroti bagaimana berbagai aktor pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan individu berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Menurut Pierre dan Peters (2020), tata kelola modern bukan hanya tentang bagaimana pemerintah mengatur, tetapi juga bagaimana jejaring aktor bekerja sama dalam menciptakan kebijakan yang efektif. Hal ini sejalan dengan konsep *network governance* yang menekankan pentingnya koordinasi dalam kebijakan publik dan peran aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan (Klijn *et al.*, 2015).

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan ekstrem, *Model Institutional Analysis and Development (IAD)* sangat relevan karena memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana berbagai aktor berinteraksi dalam sebuah arena aksi berdasarkan aturan-aturan yang berlaku dan kondisi kelembagaan yang melingkupinya. Isu kemiskinan ekstrem bukan hanya menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan seperti organisasi non-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam kerangka IAD, arena aksi adalah tempat terjadinya interaksi antar aktor, yang dipengaruhi oleh *rules-in-use*, atribut komunitas, dan kondisi biofisik. Studi-studi seperti yang dikemukakan oleh Agrawal dan Ribot (1999) menunjukkan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan sangat ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan aktor lokal difasilitasi dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, suatu hal yang dapat dianalisis melalui lensa *interactions and outcomes* dalam Model IAD (Agrawal, 1999).

Dalam studi tentang tata kelola kemiskinan ekstrem, pendekatan berbasis jaringan seperti *Net-Map* dapat digunakan untuk memetakan hubungan antaraktor serta mengidentifikasi peran strategis dalam ekosistem kebijakan (Schiffer & Hauck, 2010). Dengan memahami pola interaksi dan distribusi pengaruh dalam jaringan kebijakan, pemerintah daerah dapat merancang strategi yang lebih terarah dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi. Analisis SWOT kemudian digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi, sedangkan metode QSPM membantu dalam menentukan strategi yang paling optimal untuk meningkatkan sinergi antarpemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem (David & David, 2017). Dengan menggunakan pendekatan IAD secara menyeluruh, strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat dirancang secara lebih kontekstual dan adaptif terhadap dinamika lokal.

Dengan demikian, Model IAD menjadi landasan konseptual yang kuat dalam menganalisis kolaborasi aktor dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di tingkat pemerintah lokal. Melalui kerangka IAD, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana aturan-aturan kelembagaan (*rules-in-use*), atribut komunitas, dan kondisi biofisik memengaruhi interaksi antar aktor dalam arena aksi yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap struktur kelembagaan, hubungan kekuasaan, dan hasil kebijakan yang dihasilkan dari interaksi berbagai pemangku kepentingan. Dengan memetakan dinamika tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi strategi kolaborasi yang paling efektif untuk meningkatkan respons kebijakan terhadap kemiskinan

ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan tata kelola sosial dan ekonomi, khususnya dalam mendesain kebijakan yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkeadilan di tingkat pemerintahan daerah.

2.5.1 Robust Governance

Korporasi tata kelola yang kuat, juga disebut sebagai "*governance* yang kuat", memiliki kemampuan untuk mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian dalam lingkungan yang terus berubah. Konsep ini menekankan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan masalah dan tetap stabil dan konsisten dalam pengambilan keputusan. Salah satu karakteristik utama dari *governance* yang kuat adalah kemampuannya untuk memperhitungkan dan mengintegrasikan berbagai perspektif serta kepentingan dari pemangku kepentingan yang berbeda. Dengan demikian, inklusivitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan ditingkatkan, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dan dukungan public. Dalam *governance* yang kuat, pendekatan adaptif adalah elemen penting. Metode ini memungkinkan organisasi untuk belajar dari pengalaman dan umpan balik sambil mengubah kebijakan dan strategi mereka sesuai kebutuhan. Pendekatan ini mendorong kreativitas dan peningkatan berkelanjutan dalam praktik tata kelola (Hill & Hupe, 2021).

Robust governance adalah konsep yang merujuk pada kemampuan sistem pemerintahan untuk beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi masalah yang tidak terduga dan penuh gejolak. Konsep ini menjadi semakin relevan dalam konteks krisis global seperti pandemi COVID-19, krisis keuangan, dan perubahan iklim, yang menuntut respons pemerintahan yang fleksibel dan inovatif (Ansell *et al.*, 2020). Selain itu, dalam menghadapi perubahan yang cepat dan tidak terduga, keluwesan dan adaptabilitas sangat penting. Dalam situasi yang sulit, sistem pemerintahan harus dapat menyesuaikan strategi dan operasionalnya untuk mempertahankan fungsi inti dan mencapai tujuan (Previtali & Salvati, 2023).

Selain itu jika dilihat dalam situasi kritis, kolaborasi antara sektor publik dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci. *Robust governance* mendorong ko-

kreasi, di mana pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan organisasi lain untuk mengembangkan solusi yang efektif. Kemudian, pemerintah yang menerapkan *robust governance* sering kali menggunakan berbagai strategi untuk menghadapi tantangan. Ini termasuk perencanaan kontingensi, manajemen organisasi yang efektif, dan kapasitas analitis yang kuat untuk menilai dan merespons situasi krisis (Salvador & Sancho, 2023). Selanjutnya Morrison (2023) menjelaskan studi tentang pengelolaan *Great Barrier Reef* menunjukkan bahwa meskipun struktur pemerintahan yang kompleks dan stabil dapat membantu, namun tetap diperlukan antisipasi terhadap perubahan eksternal untuk menjaga efektivitas dan keberlanjutan (Morrison, 2017).

Dari penjelasan yang di atas tentang konsep *Robust Governance*, dapat dikatakan bahwa *Robust governance* adalah pendekatan yang penting dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan tidak terduga. Dengan menekankan adaptabilitas, kolaborasi, dan penggunaan strategi yang beragam, *robust governance* dapat membantu sistem pemerintahan untuk tetap efektif dan berkelanjutan dalam situasi krisis. Sedangkan dalam konteks penanggulangan kemiskinan ekstrem, konsep *Robust Governance* memiliki relevansi yang kuat dalam membangun model kolaborasi yang adaptif dan berkelanjutan. Kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan multidimensional yang membutuhkan respon cepat, fleksibilitas kebijakan, serta keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan menerapkan prinsip *Robust Governance*, pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dengan sektor swasta, NGO, dan masyarakat dalam menciptakan solusi inovatif yang berbasis partisipasi. Selain itu, mekanisme seperti perencanaan strategis berbasis data, evaluasi kebijakan secara berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas analitis aktor-aktor kebijakan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas program kolaboratif. Sebagaimana dalam studi Morrison (2017) tentang *Great Barrier Reef*, keberlanjutan kebijakan bergantung pada kemampuan untuk mengantisipasi perubahan eksternal, sehingga dalam model kolaborasi penanggulangan kemiskinan ekstrem, diperlukan sistem yang tidak hanya stabil, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik.

Dengan demikian, pendekatan *Robust Governance* dapat memperkuat daya tahan dan efektivitas kolaborasi antaraktor dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

2.5.2 *Agile Governance*

Agile governance adalah pendekatan yang berkembang dalam manajemen proyek dan organisasi yang menekankan fleksibilitas, responsivitas, dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Pendekatan ini berbeda dari tata kelola tradisional yang cenderung lebih kaku dan berfokus pada kontrol yang ketat. *Agile governance* mencakup berbagai dimensi dan praktik yang dirancang untuk mendukung kinerja proyek yang lebih baik. Sebuah studi mengidentifikasi enam dimensi utama dalam tata kelola proyek *agile: business case*, kontrak, pengendalian, pengarahan, pengambilan keputusan, dan pengembangan kapabilitas (Mergel *et al.*, 2020).

Agile governance juga telah diadopsi dalam sektor publik, di mana prinsip-prinsip *agile* digunakan untuk merencanakan proyek, bekerja dalam sprint pendek, dan iterasi setelah menerima umpan balik dari pemangku kepentingan. Pendekatan ini memungkinkan administrasi publik untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan eksternal (Mergel, 2023). Selain itu, penerapan *agile* dalam administrasi publik melibatkan tantangan dalam mengadopsi pola pikir dan praktik kerja *agile*, yang dapat dipengaruhi oleh persepsi dan penerimaan pegawai negeri terhadap *affordances* sosial dari *agile governance* (Mergel, 2023).

Agile governance menjadi pendekatan yang semakin penting untuk manajemen proyek dan organisasi, terutama dalam lingkungan yang cepat berubah. Organisasi dapat meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas dengan menerapkan prinsip-prinsip *agile*, tetapi harus tetap memperhatikan kontrol dan akuntabilitas. Teori *Agile Governance* diusulkan untuk menganalisis dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kelincahan dalam bisnis dapat membentuk tata kelola yang efektif dan responsif. Teori ini dioperasionalkan

melalui pengembangan skenario teoritis, proposisi, indikator empiris, dan hipotesis yang dapat diuji untuk menilai kelayakan teori ini di dunia nyata (Luna *et al.*, 2019).

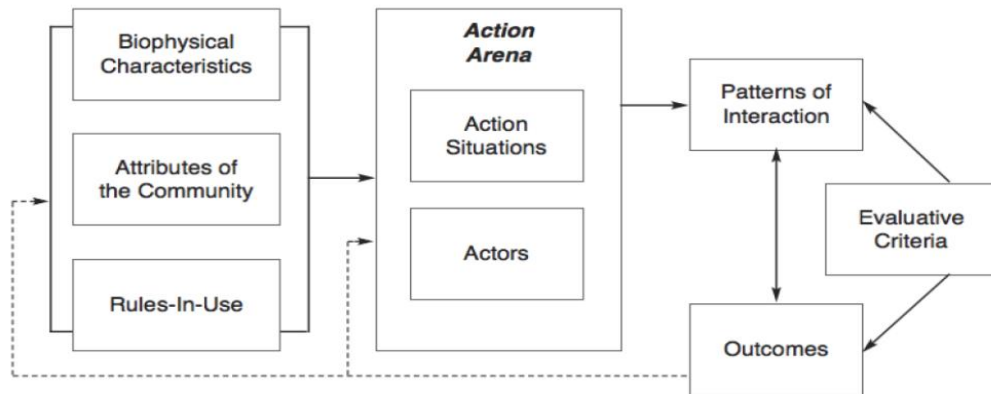
Dalam model kolaborasi penanggulangan kemiskinan ekstrem, *Agile Governance* berperan penting dalam menciptakan mekanisme koordinasi yang lebih dinamis dan efisien. Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip ini akan lebih mudah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan kondisi sosial-ekonomi, serta meminimalisir hambatan birokrasi yang dapat menghambat respons cepat terhadap kemiskinan ekstrem. Sebagai contoh, beberapa negara berkembang telah menerapkan platform digital dan sistem informasi berbasis data *real-time* untuk memonitor kemiskinan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif (UNDP, 2022). Selain itu, *Agile Governance* juga memungkinkan pemerintah untuk mengadopsi pendekatan berbasis proyek kecil (*pilot projects*) guna menguji efektivitas strategi sebelum diimplementasikan secara luas. Dengan demikian, penerapan *Agile Governance* dalam model kolaborasi penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat meningkatkan kecepatan respons, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, serta memperkuat sinergi antaraktor dalam kebijakan publik.

2.6 Model Institutional Analysis and Development (IAD) Elinor Ostrom

Model kolaborasi aktor yang dikembangkan dalam kerangka *Institutional Analysis and Development (IAD)* oleh Elinor Ostrom sangat relevan dalam konteks kebijakan publik yang kompleks, terutama dalam menghadapi isu-isu yang memerlukan keterlibatan multiaktor seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola sumber daya publik. Pendekatan ini menekankan pentingnya analisis terhadap konteks kelembagaan, struktur aturan formal dan informal, serta karakteristik komunitas sebagai landasan dalam membentuk arena interaksi antaraktor.

Dengan mengadopsi pendekatan IAD, pemerintah lokal dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kolaborasi, mengoordinasikan peran berbagai pemangku kepentingan, serta membangun proses pengambilan keputusan yang inklusif dan adaptif. IAD juga memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap hasil kolaborasi, baik dari segi efektivitas, efisiensi, keadilan distribusi

manfaat, maupun keberlanjutan program. Berikut adalah bentuk model *Institutional Analysis Development* (IAD) oleh Ostrom (2014):



Gambar 3. Ostrom *Institutional Analysis Development* (IAD) Framework (Ostrom et al. 2012:271)

Model *Institutional Analysis Development* (IAD) oleh Ostrom memiliki komponen sebagai berikut:

1. *Biophysical Characteristics*

Komponen pertama dalam Model IAD adalah *biophysical characteristics*, yaitu karakteristik biofisik yang mencakup kondisi alam, lingkungan fisik, dan ketersediaan sumber daya yang memengaruhi interaksi dalam sistem kelembagaan. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan ekstrem, karakteristik biofisik ini sangat penting karena menentukan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan, dan infrastruktur lainnya. Daerah terpencil atau rawan bencana, misalnya, memiliki tantangan berbeda dibanding wilayah yang memiliki infrastruktur memadai dalam pelaksanaan program sosial. Ostrom (2011) menekankan bahwa karakteristik ini membentuk batasan objektif bagi aktor dalam arena aksi dan turut memengaruhi hasil kebijakan yang diterapkan.

2. *Attributes of the Community*

Merujuk pada aktor-aktor yang terlibat dalam sistem, yaitu:

- a. Masyarakat (*Users*): penerima manfaat, seperti warga miskin ekstrem.
- b. Penyedia Layanan (*Providers*): pelaksana program, seperti dinas sosial, pemerintah desa, dan pelaku CSR.

- c. Pembuat Kebijakan (*Policymakers*): seperti Bappeda, kepala daerah, atau DPRD. Atribut ini mencerminkan peran sosial dan fungsional dalam komunitas yang relevan terhadap isu kebijakan publik.

Atribut ini menjadi sangat penting dalam menilai kesiapan dan kemampuan komunitas untuk berpartisipasi dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Menurut Ostrom (2005), komunitas yang memiliki ikatan sosial yang kuat dan budaya partisipatif lebih mampu menghasilkan keputusan bersama yang efektif dan berkelanjutan.

3. *Rules-in-Use*

Rules-in-use adalah seperangkat aturan formal maupun informal yang membentuk interaksi dalam arena aksi. Terdiri dari:

- a. *Constitutional Rules*: Aturan dasar yang menetapkan siapa yang boleh membuat aturan. Contoh: peraturan perundangan nasional (Inpres No. 4 Tahun 2021, Keputusan Menteri, dan Undang-Undang terkait penanggulangan kemiskinan).
- b. *Collective Choice Rules*: Aturan yang ditetapkan oleh aktor kolektif seperti pemerintah daerah, DPRD, dan forum pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan lokal. Contoh: Peraturan Bupati, RPJMD, atau kebijakan lintas dinas.
- c. *Operational Rules*: Aturan teknis yang mengatur bagaimana program dijalankan secara langsung. Contoh: mekanisme verifikasi dan validasi data DTKS, SOP distribusi bantuan, dan teknis koordinasi antardinas.

Dalam tata kelola kolaboratif, aturan memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengambil keputusan, siapa yang mengakses sumber daya, serta bagaimana sanksi diterapkan jika terjadi pelanggaran. Ostrom (1990) menyatakan bahwa keberhasilan kelembagaan sangat bergantung pada bagaimana aturan-aturan ini dirancang dan diterapkan secara konsisten oleh para pemangku kepentingan.

4. *Action Arena (Action Situations dan Actors)*

Action arena adalah inti dari Model IAD yang menggambarkan tempat terjadinya interaksi antar aktor dalam situasi tertentu yang melibatkan

pengambilan keputusan. Arena ini terdiri dari *action situations* (situasi aksi), yaitu konteks interaksi yang terjadi, serta *actors* (aktor), yakni individu atau organisasi yang terlibat dalam proses tersebut. Dalam kasus penanggulangan kemiskinan ekstrem, arena aksi bisa berupa forum musyawarah, proses distribusi bantuan, atau koordinasi program antar lembaga. Ostrom (2011) menjelaskan bahwa dinamika dalam arena aksi sangat ditentukan oleh atribut aktor, sumber daya yang dimiliki, serta strategi yang mereka pilih berdasarkan insentif dan aturan yang berlaku.

5. *Patterns of Interaction*

Pola interaksi menggambarkan bentuk-bentuk hubungan yang berkembang antar aktor dalam arena aksi. Pola ini mencakup kerja sama, negosiasi, konflik, pembentukan aliansi, dan pertukaran informasi. Dalam konteks kolaborasi aktor untuk kebijakan publik, memahami pola interaksi sangat penting untuk mengevaluasi apakah proses yang terjadi mendukung tercapainya tujuan bersama. Menurut McGinnis (2011), pola interaksi dapat menjadi indikator awal dalam menilai apakah kelembagaan yang ada bersifat inklusif, eksklusif, kooperatif, atau justru kompetitif, yang pada akhirnya akan memengaruhi efektivitas dan legitimasi hasil kebijakan.

6. *Outcomes*

Outcomes atau hasil merupakan konsekuensi dari pola interaksi antar aktor di dalam arena aksi. Hasil ini bisa berupa kebijakan, program, perilaku baru, maupun perubahan dalam struktur kelembagaan. Dalam studi kebijakan publik, hasil dinilai tidak hanya dari segi pencapaian kuantitatif, tetapi juga dari dampak sosialnya, seperti keadilan distribusi, keberlanjutan program, dan tingkat kepuasan publik. Ostrom (2010) menekankan pentingnya melakukan evaluasi hasil untuk mengetahui apakah kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan tujuan awal dan mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

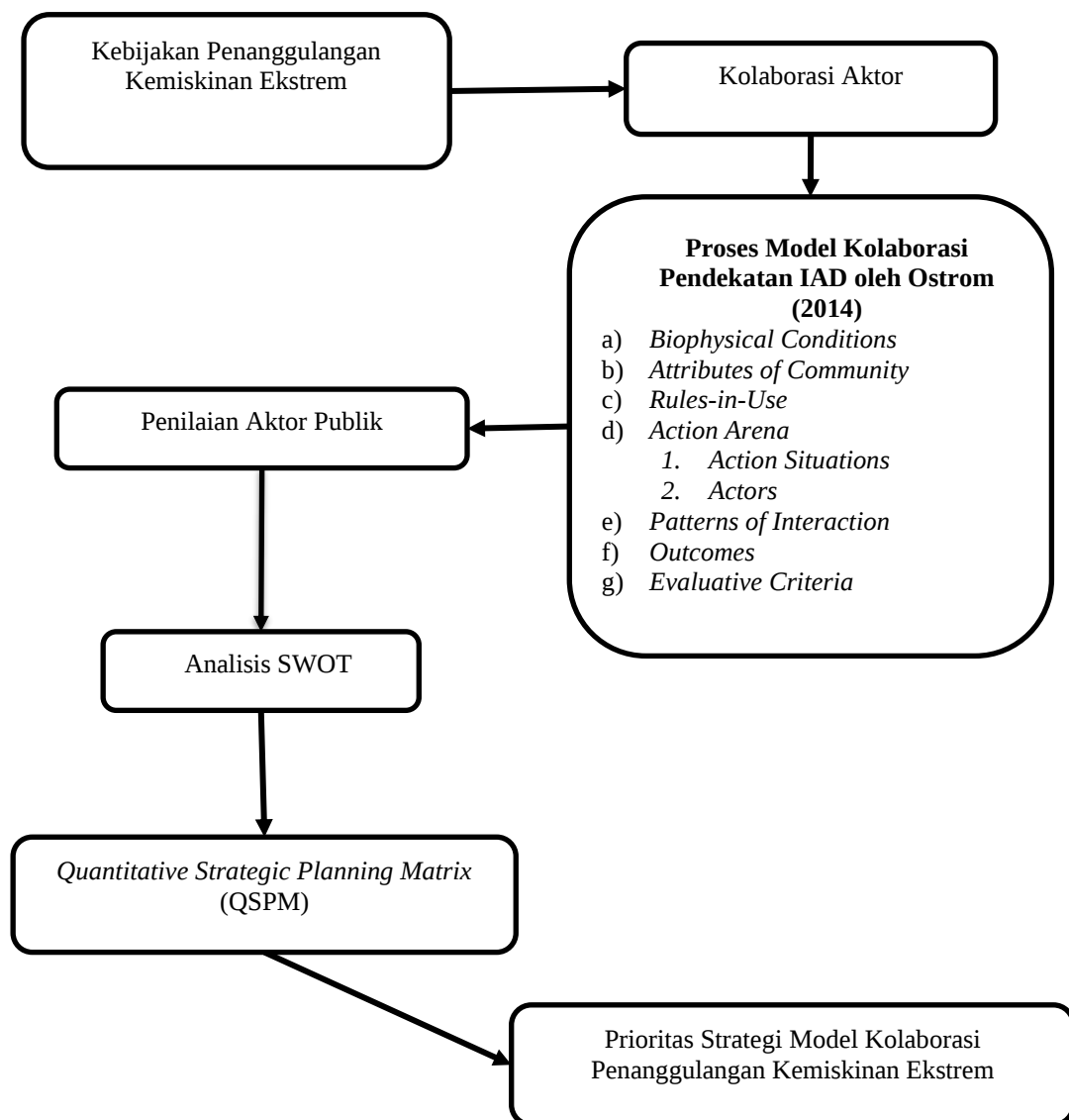
7. *Evaluative Criteria*

Evaluative criteria adalah seperangkat indikator yang digunakan untuk menilai kualitas proses dan hasil kebijakan dalam arena aksi. Kriteria ini biasanya mencakup efektivitas, efisiensi, keadilan (*equity*), keberlanjutan

(*sustainability*), dan partisipasi. Dalam Model IAD, evaluasi menjadi penting karena memungkinkan perbaikan kelembagaan berdasarkan refleksi atas hasil yang telah dicapai. Menurut Kiser dan Ostrom (1982), evaluasi berbasis kriteria yang transparan dapat memperkuat akuntabilitas dan mendorong pembelajaran kelembagaan yang berkelanjutan.

2.7 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian dibuat untuk melihat hubungan variabel pada model melalui gambar. Penelitian ini dirumuskan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 4. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau manusia secara mendalam, melalui pengumpulan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dokumen, dan narasi. Sedangkan, penelitian kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau kejadian dengan menggunakan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya dan untuk menguji hubungan antar variabel dalam populasi atau sampel yang lebih besar. bertujuan untuk menggambarkan data yang terkumpul dengan cara yang sistematis dan objektif. Dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan data numerik melalui instrumen yang telah distandarisasi, kemudian menganalisisnya dengan teknik statistik (Creswell & Creswell, 2017).

Penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif karena bertujuan untuk menggambarkan dan menilai efektivitas suatu model kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan. Menurut Sugiyono (2017) mendefinisikan penelitian deskriptif evaluatif sebagai penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan menilai suatu fenomena atau kejadian serta mengevaluasi seberapa baik suatu program, model, atau strategi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan model kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan dan menilai seberapa efektif model tersebut dalam mengurangi kemiskinan (Sugiyono, 2017).

Argumen peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bukti empiris yang kuat dan generalisasi yang dapat diandalkan terkait dengan efektivitas model kolaborasi aktor. Dengan demikian, penggunaan metode kuantitatif diharapkan dapat memberikan pemahaman yang

lebih mendalam tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di pemerintah lokal, serta mendukung pengembangan rekomendasi kebijakan yang lebih terinformasi dan efektif.

Kerangka konseptual yang digunakan adalah *Institutional Analysis and Development (IAD) Framework* yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom (2010). Model IAD dipilih karena mampu menganalisis kompleksitas interaksi antaraktor dalam sistem kelembagaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor institusional dan struktural yang mempengaruhi hasil kebijakan publik. Dalam kerangka IAD, unit analisis utama adalah *arena aksi* yang menggambarkan situasi di mana para aktor berinteraksi, membuat keputusan, dan menghasilkan kebijakan atau tindakan kolektif. Penelitian ini juga mengombinasikan beberapa metode analisis untuk mendukung pendekatan IAD, yaitu:

- a) *Stakeholder Analysis*, digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pengaruh dan kepentingan para aktor yang terlibat dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
- b) *Net-Map*, digunakan untuk memetakan jaringan kekuasaan dan pengaruh antaraktor dalam sistem kebijakan lokal.
- c) *SWOT Analysis*, digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi.
- d) *QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix)*, digunakan untuk menentukan strategi prioritas yang paling sesuai dalam memperkuat model kolaborasi antaraktor.

Dengan menggunakan kombinasi pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika kolaborasi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan, sekaligus memberikan masukan strategis berbasis data yang akurat dan terukur.

Tabel 3. Definisi Konseptual dan Operasional Model Ostrom IAD (2014) Berdasarkan Pengaruh dan Kepentingan *Stakeholder*

Variabel	Dimensi (Komponen IAD)	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator	Butir Pertanyaan
Pengaruh Stakeholder	1. <i>Biophysical Conditions</i>	Faktor fisik dan lingkungan yang memengaruhi arena aksi kolaborasi.	Kondisi sumber daya dan geografis yang berpengaruh terhadap keterlibatan aktor.	1.1 Ketersediaan sumber daya	1.1.1 Sumber daya mendukung kolaborasi 1.1.2 Fasilitas publik memengaruhi peran 1.1.3 Sumber daya meningkatkan daya tawar 1.1.4 Infrastruktur mempengaruhi efektivitas
				1.2 Aksesibilitas wilayah	1.2.1 Lokasi memengaruhi partisipasi 1.2.2 Akses ke lokasi memadai 1.2.3 Aktor jauh dari pusat berpengaruh kecil 1.2.4 Wilayah sulit akses membatasi peran

Variabel	Dimensi (Komponen IAD)	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator	Butir Pertanyaan
	2. <i>Rules-in-Use</i>	Aturan formal/informal yang memengaruhi perilaku kolaboratif.	- Aturan nasional yang menjadi dasar legitimasi kebijakan (<i>Constitutional Rules</i>) - Kebijakan daerah atau antar instansi yang menentukan bentuk dan peran kolaborasi (<i>Collective Choice Rules</i>) - Aturan teknis yang fleksibel dan diterapkan di lapangan (<i>Operational Rules</i>)	2.1 Kejelasan dan Legitimasi Aturan 2.2 Fleksibilitas dan Pelaksanaan di Lapangan	2.1.1 Aturan kolaborasi jelas 2.2.1 Aktor memahami aturan 2.3.1 Aturan menempatkan peran adil 2.4.1 Ketaatan aturan memberi pengaruh 2.5.1 Kebijakan adaptif terhadap kolaborasi 2.5.2 Aturan fleksibel beri ruang pengaruh 2.6.1 Kebijakan mudah disesuaikan 2.7.1 Kelonggaran aturan memperkuat peran 3.1 Kontribusi terhadap hasil
	3. <i>Outcomes</i>	Hasil nyata dari interaksi kolaboratif	Kontribusi dan pengaruh aktor terhadap hasil program.	3.1 Kontribusi terhadap hasil	3.1.1 Kontribusi memengaruhi keberhasilan

Variabel	Dimensi (Komponen IAD)	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator	Butir Pertanyaan
					3.1.2 Hasil mencerminkan pengaruh 3.1.3 Capaian dipengaruhi aktor dominan 3.1.4 Pengaruh besar terhadap keluaran 3.2 Pengaruh terhadap dampak 3.2.1 Program sesuai harapan Anda 3.2.2 Hasil mencerminkan peran Anda 3.2.3 Pengaruh tentukan keberlanjutan 3.2.4 Anda pengaruhi manfaat akhir program
	4. Action Arena (Actors)	Aktor dalam arena aksi kolaborasi	Posisi, kapasitas, dan otoritas aktor dalam pengambilan keputusan	4.1 Posisi dalam struktur	4.1.1 Posisi strategis dalam kolaborasi 4.1.2 Pengaruh dalam keputusan 4.1.3 Jabatan perkuat pengaruh

Variabel	Dimensi (Komponen IAD)	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator	Butir Pertanyaan
				4.2 Kapasitas sumber daya	4.1.4 Posisi tinggi = pengaruh tinggi 4.2.1 Anda punya sumber daya penting 4.2.2 Kapabilitas teknis memperkuat peran 4.2.3 Dukungan lembaga memperkuat kolaborasi 4.2.4 Sumber daya beri pengaruh
	5. <i>Action Arena (Action Situations)</i>	Situasi interaksi dan pengambilan keputusan dalam kolaborasi	Tingkat keterlibatan aktor dalam forum dan pengambilan keputusan	5.1 Akses terhadap forum	5.1.1 Anda selalu diundang dalam forum 5.1.2 Bebas menyuarakan pendapat 5.1.3 Akses informasi memperkuat peran 5.1.4 Mengetahui proses kolaborasi 5.2.1 Terlibat dalam keputusan penting

Variabel	Dimensi (Komponen IAD)	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator	Butir Pertanyaan
				5.2 Keterlibatan keputusan	5.2.2 Usulan sering diterima 5.2.3 Menentukan arah program 5.2.4 Masukan memengaruhi keputusan
Kepentingan Stakeholder	6. <i>Attributes of Community</i>	Komunitas terdiri dari berbagai aktor yang memiliki peran dan kepentingan berbeda dalam program	Tingkat keterlibatan dan kepentingan dari masyarakat, pelaksana, dan pembuat kebijakan dalam sistem kolaboratif	6.1 Identitas & Peran Aktor	6.1.1 Saya terlibat dalam program sebagai: user, provider, atau policymaker 6.1.2 Saya memahami dengan jelas peran saya dalam program 6.1.3 Saya terlibat dalam perencanaan dan evaluasi program 6.1.4 Kepentingan saya sesuai dengan arah program

Variabel	Dimensi (Komponen IAD)	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator	Butir Pertanyaan
				6.2 Hubungan & Struktur Sosial	6.2.1 Hubungan antar pelaksana dan masyarakat berlangsung terbuka 6.2.2 Komunitas saya memiliki akses terhadap informasi program 6.2.3 Pemimpin komunitas berperan memfasilitasi kolaborasi 6.2.4 Terdapat koordinasi jelas antara pemerintah dan masyarakat
	7. <i>Patterns of Interaction</i>	Pola hubungan dan koordinasi antar aktor	Sejauh mana hubungan antar aktor menentukan kepentingan	7.1 Intensitas koordinasi	7.1.1 Koordinasi dengan aktor lain kuat 7.1.2 Koordinasi memengaruhi prioritas 7.1.3 Kepentingan dipengaruhi interaksi

Variabel	Dimensi (Komponen IAD)	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator	Butir Pertanyaan
				7.2 Kualitas hubungan	7.1.4 Sering berkoordinasi membentuk kepentingan 7.2.1 Hubungan harmonis dorong kolaborasi 7.2.2 Kepentingan muncul dari hubungan baik 7.2.3 Kepercayaan pengaruhi tujuan 7.2.4 Relasi positif kuatkan peran
	8. <i>Evaluative Criteria</i>	Kriteria untuk menilai hasil kolaborasi	Harapan aktor terhadap keberhasilan kolaborasi	8.1 Persepsi keberhasilan	8.1.1 Program sesuai harapan Anda 8.1.2 Anda nilai program efektif 8.1.3 Harapan Anda terhadap output tinggi 8.1.4 Tujuan Anda tercapai melalui program

Variabel	Dimensi (Komponen IAD)	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator	Butir Pertanyaan
				8.2 Kepuasan terhadap hasil	8.2.1 Anda puas dengan hasil kolaborasi 8.2.2 Output program sesuai keinginan 8.2.3 Harapan pribadi terpenuhi 8.2.4 Kepentingan pribadi tercapai

Sumber: data diolah peneliti

3.2 Sumber Data

Data kualitatif dan kuantitatif diperoleh dari observasi dan penelusuran sumber data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yaitu TKPK, masyarakat dan media massa. Sedangkan data sekunder berupa dokumen undang-undang, peraturan pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan, surat keputusan pembentukan TKPK, laporan kinerja TKPK serta dokumen BPS lainnya yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan.

3.2.1 Peristiwa

Peristiwa yang ada dalam penelitian ini adalah dikarenakan adanya masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Keberadaan masyarakat miskin mendorong pemerintah membentuk tim penanggulangan kemiskinan (TKPK) yang melibatkan unsur swasta, perguruan tinggi dan masyarakat. Keterlibatan beberapa unsur di luar pemerintah mempengaruhi peristiwa selanjutnya yaitu pelaksanaan kerjasama antar unsur dalam tim. Proses kerjasama tersebut melahirkan model kolaborasi aktor.

3.2.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Kabupaten Lampung Selatan. TKPKD merupakan wadah koordinasi lintas sektor yang terdiri dari berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, serta akademisi yang berperan dalam perumusan dan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, informan utama dalam penelitian ini mencakup pejabat pemerintah yang tergabung dalam TKPKD sesuai dengan Surat Keputusan Bupati yang dikeluarkan, seperti Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial, serta perwakilan dari instansi terkait yang memiliki tugas dan kewenangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem.

Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan perwakilan dari organisasi non-pemerintah, dunia usaha, serta tokoh masyarakat yang menjadi bagian dari TKPKD atau memiliki keterlibatan aktif dalam program penanggulangan kemiskinan. Informan dari sektor ini dipilih untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai efektivitas kolaborasi antar-aktor dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang memiliki peran strategis dalam kebijakan dan implementasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan dinamika kerja sama dalam TKPKD secara komprehensif. Kriteria informan antara lain:

- a. memiliki kepentingan dan pengaruh besar dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem,
- b. masuk dalam Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem,
- c. memiliki interaksi langsung dalam program,
- d. memahami kondisi internal dan eksternal kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem, serta
- e. merupakan pembuat kebijakan dan pelaksana program untuk menilai model strategi terbaik.

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Kelompok Sampel	Jabatan	Perangkat Daerah	Jumlah (Orang)
State (Pemerintah /Pemerintah Lokal)				
1	Bupati	Penanggung Jawab	Pemkab	1
2	Wakil Bupati	Ketua	Pemkab	1
3	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua	Pemkab	1
4	Kepala Bappeda	Sekretaris	Bappeda	1
5	Kepala Dinas Sosial	Wakil Sekretaris	Dinas Sosial	1
6	Kepala DPMD	Wakil Sekretaris	DPMD	1
7	Kepala Disdukcapil	Wakil Sekretaris	Disdukcapil	1
8	Asisten Bidang Pemerintahan & Kesra	Koordinator Kelompok Bansos	Pemkab	1
9	Asisten Bidang Ekobang	Koordinator Kelompok Pemberdayaan Masyarakat	Pemkab	1

No	Kelompok Sampel	Jabatan	Perangkat Daerah	Jumlah (Orang)
10	Kadis Kesehatan	Anggota	Dinas Kesehatan	1
11	Kadis Pendidikan	Anggota	Dinas Pendidikan	1
12	Kadis Pengendalian Penduduk & KB	Anggota	Dinas Pengendalian Penduduk & KB	1
13	Kadis Perumahan & Permukiman	Anggota	Dinas Perumahan & Permukiman	1
14	Kadis Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Anggota	Dinas PUPR	1
15	Kadis Perhubungan	Anggota	Dinas Perhubungan	1
16	Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	Anggota	Dinas Tanaman Pangan	1
17	Kadis Perikanan	Anggota	Dinas Perikanan	1
18	Kadis Peternakan & Kesehatan Hewan	Anggota	Dinas Peternakan	1
19	Kadis Ketahanan Pangan	Anggota	Dinas Ketahanan Pangan	1
20	Kadis Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	Anggota	Dinas Koperasi & UKM	1
21	Kadis Tenaga Kerja & Transmigrasi	Anggota	Dinas Tenaga Kerja	1
22	Kadis Perdagangan & Perindustrian	Anggota	Dinas Perdagangan	1
23	Kadis PPPA	Anggota	Dinas PPPA	1
Market (Swasta / Sektor Bisnis)				
24	PLN	Anggota	PLN	1
25	BULOG	Anggota	BULOG	1
26	KADIN Lampung Selatan	Anggota	KADIN	1
27	PDAM	Anggota	PDAM	1
28	Bank Lampung	Anggota	Bank Lampung	1
Civil Society (Masyarakat Sipil / Media / LSM / Akademisi)				
29	Akademisi (STIH /STIE Muhammadiyah Kalianda)	Anggota	Universitas	1
30	Perwakilan LSM (PALUMA)	Anggota	LSM	1
31	BPS	Anggota	BPS	1
32	Lampung Post	Anggota	Media	1
33	Radar Lampung	Anggota	Media	1
34	Tribun Lampung	Anggota	Media	1
35	Media Berita Kita	Anggota	Media	1
Jumlah Responden				35

Sumber: Surat Keputusan Bupati Lamsel, 2024

Dalam penelitian ini, metode *purposive sampling* digunakan untuk menentukan responden yang memiliki relevansi tinggi terhadap topik penelitian. *Purposive sampling* dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi aktor-aktor utama yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di tingkat pemerintah lokal (Creswell, 2014). Berdasarkan kajian sebelumnya, jumlah responden minimal 15 orang dianggap memadai untuk mencapai saturasi data, yaitu titik di mana informasi yang diperoleh tidak lagi menghasilkan wawasan baru (Guest, Bunce, & Johnson, 2006). Dalam konteks analisis *stakeholder* dan strategi kebijakan publik, jumlah ini cukup untuk menangkap perbedaan kepentingan dan peran berbagai aktor dalam proses kolaborasi (Bryson, 2018).

Selain itu, dalam metode SWOT dan QSPM, pemilihan responden harus mempertimbangkan pemangku kepentingan utama yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan yang dievaluasi (David, 2011). Studi terdahulu menunjukkan bahwa dalam analisis strategi, jumlah responden 15-20 orang cukup untuk menghasilkan bobot dan prioritas strategi yang valid (Martino, 1993). Hal ini sejalan dengan pendapat Patton (2015), yang menyatakan bahwa dalam penelitian berbasis *purposive sampling*, jumlah responden tidak bergantung pada prinsip statistik probabilitas, tetapi pada kecukupan informasi yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam.

Dengan demikian, penggunaan 15-20 responden *purposive* dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan akademik dan metodologis yang kuat. Selain memastikan keberagaman perspektif dalam model kolaborasi, jumlah ini juga mempertimbangkan efisiensi dalam pengolahan data, sehingga analisis dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan kebutuhan penelitian kebijakan publik (Reed *et al.*, 2009).

3.2.3 Dokumen

Dokumen merupakan data pelengkap dari data peristiwa dan data yang bersumber dari informan. Data dokumen diperoleh melalui penelusuran dokumen peraturan pemerintah, surat keputusan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tentang

pembentukan TKPK, laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, laporan kinerja TKPK dan berita tentang kemiskinan ekstrem Kabupaten Lampung Selatan di media massa.

3.3 Gambaran Areal dan Lokasi Penelitian

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dengan luas wilayah sekitar 2.109,74 km², yang terdiri dari 17 kecamatan, 256 desa, dan 4 kelurahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan mencapai sekitar 1,1 juta jiwa. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Bandar Lampung dan memiliki akses strategis ke Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan menjadi pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Provinsi Lampung. Namun, meskipun memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, tantangan sosial seperti angka kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah (Badan Pusat Statistik, 2024)

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan berkisar di angka 12,57% dan tingkat kemiskinan ekstrem 2,16%, dengan sebagian besar penduduk miskin tersebar di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Selatan berada di sekitar 70,28, yang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung. Dari segi infrastruktur, daerah ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan adanya jalan tol Trans-Sumatra yang meningkatkan konektivitas antarwilayah. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap air bersih, listrik, serta sarana pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah terpencil.

3.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti melakukan penelitian untuk menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi serta memperoleh data yang akurat dari objek yang diteliti (Moleong, 2016). Penelitian ini berlokasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan, yang berperan sebagai pusat perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Bappeda memiliki tugas strategis dalam merumuskan kebijakan serta mengoordinasikan program penanggulangan kemiskinan di daerah, termasuk dalam perencanaan dan evaluasi strategi kolaboratif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Selain itu, Bappeda juga menjadi sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan monitoring kebijakan pengentasan kemiskinan. Dengan peran tersebut, pemilihan lokasi penelitian di Bappeda diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebijakan serta mekanisme kerja sama lintas sektor dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan.

3.3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktor kunci dari sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat sipil, serta memahami bagaimana interaksi mereka terbentuk dalam arena aksi kebijakan. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi peran setiap aktor dalam mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di tingkat lokal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Model Institutional Analysis and Development* (IAD) yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom. Model ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap arena aksi (*action arena*) yang menjadi tempat berlangsungnya interaksi antara aktor-aktor (*actors*) dalam situasi kebijakan tertentu (*action situations*). Dalam konteks ini, analisis akan difokuskan pada bagaimana struktur aturan (*rules-in-use*), kondisi biofisik (*biophysical conditions*), dan atribut komunitas (*attributes of community*) membentuk pola interaksi (*patterns of interaction*) dan memengaruhi hasil kebijakan (*outcomes*).

Dengan menggunakan metode *Stakeholder Analysis* dan *Net-Map*, penelitian ini akan memetakan aktor berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki posisi strategis dalam proses kebijakan. Hal ini penting untuk memahami bagaimana konfigurasi kekuasaan,

kepentingan, serta aturan-aturan yang berlaku memengaruhi efektivitas kolaborasi antar-aktor dalam sistem tata kelola.

Sebagai bagian dari analisis strategis, penelitian ini juga akan menerapkan SWOT Analysis dan QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matrix*) untuk merumuskan strategi kolaboratif yang paling efektif dan berkelanjutan. Dengan merujuk pada kerangka IAD, strategi yang dihasilkan diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem secara partisipatif dan adaptif.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Tahapan dalam pengumpulan data harus direncanakan agar mendapatkan hasil yang optimal agar sesuai dengan maksud dan tujuan. Data adalah suatu bahan mentah dalam penelitian yang akan dikumpulkan melalui prosedur yang sistematis dan standar, untuk diolah agar dapat memberikan informasi yang diinginkan dan membantu dalam pengambilan keputusan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data primer (data yang langsung didapat dari responden). Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai model kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di pemerintah lokal. Data dikumpulkan melalui metode kualitatif dan kuantitatif, dengan instrumen berupa panduan wawancara dengan jumlah 17 pertanyaan, observasi, dokumentasi dari buku laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah, rencana aksi tahunan kemiskinan, RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dan kuesioner skala *Likert* yang disusun berdasarkan variabel Pengaruh *Stakeholder* dan Kepentingan *Stakeholder* sebanyak 64 butir pertanyaan, serta aspek-aspek kolaborasi yang diadaptasi dari Model Kolaborasi IAD Ostrom (2014). Model ini menekankan dimensi-dimensi penting dalam hubungan antar-aktor seperti tingkat koordinasi, intensitas kolaborasi, dan bentuk koalisi, yang mencerminkan kedalaman interaksi dan komitmen dalam kerja sama lintas sektor. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi sejauh

mana keterlibatan aktor serta bentuk kolaborasi yang terbentuk dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

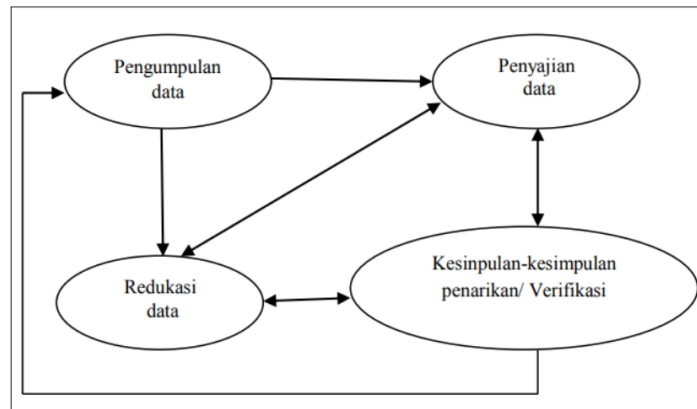
Data yang dikumpulkan berasal dari 35 responden, yang terdiri dari pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah (NGO), serta pemangku kepentingan lain yang berperan dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang masuk dalam Surat Keputusan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Selain data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, termasuk dokumen kebijakan, laporan program, kajian akademik, dan artikel terkait guna memperkuat analisis yang dilakukan.

Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian, dimana definisi dari kuisisioner sendiri yaitu bentuk dari sejumlah pertanyaan tertulis yang telah disusun oleh peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan guna mendapatkan informasi terkait. Pada penelitian ini, kuesioner/angket yang dibuat oleh peneliti, dibagikan kepada para pemangku kepentingan terkait di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan yang termasuk dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan kualitatif berdasarkan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini berlangsung secara interaktif dan terus-menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan menyusun informasi dari hasil kuesioner serta dokumentasi agar menjadi lebih fokus dan bermakna. Penyajian data melibatkan pengorganisasian informasi ke dalam bentuk narasi, tabel, dan visualisasi grafis (seperti *stakeholder mapping* dan *Net-Map*). Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah tersaji, sekaligus melakukan verifikasi terhadap temuan untuk menjamin validitas hasil.

Untuk memperjelas tahapan analisis yang digunakan, berikut ini ditampilkan gambar model interaktif Miles dan Huberman:



Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (Sugiyono 2014:14)

Gambar 5. Model Analisis Miles Huberman, Saldana (2014)

Model ini dipilih karena selaras dengan kompleksitas data yang muncul dalam penelitian kolaborasi aktor dan penanggulangan kemiskinan ekstrem di tingkat lokal.

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data yaitu pencarian data-data yang diperlukan sesuai dengan kondisi tempat penelitian. Data-data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa catatan dokumen laporan serta hasil kuesioner dengan TKPKD Kabupaten Lampung Selatan.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, kuesioner dan dokumentasi. Pada pelaksanaannya reduksi data dilakukan dengan menggunakan analisis internal dan eksternal yang ada di lingkungan sekitar Bappeda Kabupaten Lampung Selatan (Sekretariat TKPK)

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dilakukan dalam bentuk narasi, table, dan visualisasi (*Net-map* matriks). Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Setelah terkumpul cukup data selanjutnya akan diambil penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel melalui triangulasi metode.

Selanjutnya, menggunakan analisis kuantitatif untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai dinamika kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Penelitian ini menggunakan tiga metode pengolahan data yang saling berkaitan. Analisis *Stakeholder* dan *Net-Map*, analisis SWOT, dan metode QSPM digunakan untuk menentukan prioritas model kolaborasi penanggulangan kemiskinan ekstrem daerah yang efektif. Berdasarkan pendekatan SWOT, peneliti menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Data dari analisis ini diolah menggunakan *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM), dan narasumber untuk pembobotan adalah ahli. Di sini, ahli tidak berarti seseorang yang ahli dalam satu bidang keilmuan tertentu, tetapi seseorang yang benar-benar memahami masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, pakar yang dimaksud adalah orang-orang yang benar-benar memahami strategi kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan demikian, orang yang tepat untuk diminta untuk menentukan seberapa besar pengaruh faktor, variabel, dan indikator tersebut adalah pihak tim, pemerintah, praktisi, dan akademisi. Kuesioner dapat diberi batasan dalam

menjawab agar data hasil kuesioner tidak meluas dan fokus. Berikut adalah teknik analisis yang digunakan:

3.5.1 Analisis Stakeholder (Power-Interest Grid)

Analisis pemangku kepentingan dilakukan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan mana yang terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. *Stakeholder* yang memiliki pengaruh besar dan kepentingan besar terhadap keberhasilan atau kegagalan kolaborasi diidentifikasi dalam analisis ini. Matriks kepentingan dan pengaruh dapat digunakan untuk menilai sejauh mana setiap aktor berperan dalam keberhasilan program dan proses pengambilan keputusan. Analisis ini juga membantu dalam membuat rencana untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan saat ini.

Langkah-langkah analisis *stakeholder* meliputi:

1. Penyusunan instrumen kuisisioner

Kuisisioner disusun berdasarkan skala *likert* 1 hingga 5, yang digunakan untuk menilai:

- a. Tingkat pengaruh aktor, yang mencakup dimensi seperti kekuasaan dalam pengambilan keputusan, kapasitas sumber daya, akses terhadap jaringan dan informasi strategis.
- b. Tingkat kepentingan, yang mencakup seberapa besar perhatian atau keterlibatan aktor terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Setiap butir pertanyaan dalam kuisisioner disusun secara sistematis berdasarkan pendekatan *Institutional Analysis and Development* (IAD) framework. Kuisisioner mencakup dimensi-dimensi utama seperti:

- a. *Biophysical Conditions*, mencakup indikator seperti ketersediaan sumber daya dan aksesibilitas wilayah.
- b. *Rules-in-Use*, seperti kejelasan aturan dan fleksibilitas kebijakan.
- c. *Outcomes*, mencakup indikator kontribusi terhadap hasil dan pengaruh terhadap dampak.
- d. *Action arena (actors)*, mencakup indikator posisi dalam struktur dan kapasitas sumber daya

- e. *Action arena (action situation)*, mencakup indikator akses terhadap forum dan keterlibatan Keputusan
- f. *Attributes of Community*: mencakup indikator identitas dan peran actor serta hubungan dan struktur social.
- g. *Patterns of Interaction*: indikator intensitas kordinasi dan kualitas hubungan
- h. *Evaluative Criteria*: mencakup indikator persepsi keberhasilan dan kepuasan terhadap hasil.

Masing-masing indikator dijabarkan menjadi empat butir pertanyaan untuk mengukur persepsi responden terhadap kondisi tersebut. Dengan demikian, kuisisioner ini tidak hanya mengukur tingkat kepentingan dan pengaruh secara umum, tetapi juga memberikan pemetaan terhadap posisi dan peran aktor dalam kerangka kelembagaan IAD secara mendalam.

Tabel 5. Kriteria Penilaian Tingkat Pengaruh (Influence) Stakeholder dalam Kolaborasi Aktor Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

No	Parameter	Indikator	Penilaian				
			Tdk ada	Ada 1	Ada 2	Ada 3	Ada 4
1	Ketersediaan sumber daya	a. Sumber daya mendukung kolaborasi b. Fasilitas publik menunjang peran c. Infrastruktur mendukung efektivitas d. Sumber daya meningkatkan daya tawar	1	2	3	4	5
2	Aksesibilitas wilayah	a. Lokasi mudah dijangkau b. Akses ke lokasi memadai c. Jarak tidak menghambat partisipasi d. Wilayah tidak membatasi peran	1	2	3	4	5
3	Kejelasan aturan	a. Aturan kolaborasi jelas b. Aktor memahami aturan c. Peran aktor diatur secara adil d. Ketaatan terhadap aturan tinggi	1	2	3	4	5
4	Fleksibilitas kebijakan	a. Kebijakan adaptif b. Aturan fleksibel beri ruang pengaruh c. Mudah disesuaikan dengan situasi d. Kelonggaran aturan memperkuat peran	1	2	3	4	5

No	Parameter	Indikator	Penilaian				
			Tdk ada	Ada 1	Ada 2	Ada 3	Ada 4
5	Kontribusi terhadap hasil	a. Stakeholder menyumbang hasil program					
		b. Hasil mencerminkan pengaruh stakeholder					
		c. Stakeholder memengaruhi capaian program	1	2	3	4	5
		d. Pengaruh terhadap output signifikan					
6	Pengaruh terhadap dampak	a. Program sesuai harapan stakeholder					
		b. Hasil akhir mencerminkan kontribusi stakeholder					
		c. Stakeholder memengaruhi keberlanjutan	1	2	3	4	5
		d. Stakeholder berpengaruh terhadap manfaat program					
7	Posisi dalam struktur kolaborasi	a. Memiliki posisi strategis					
		b. Memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan					
		c. Jabatan memperkuat pengaruh	1	2	3	4	5
		d. Peran struktural mendukung kolaborasi					
8	Kapasitas sumber daya	a. Memiliki sumber daya penting					
		b. Kapabilitas teknis tinggi					
		c. Dukungan lembaga kuat	1	2	3	4	5
		d. Sumber daya memengaruhi pengambilan keputusan					
9	Akses terhadap forum	a. Selalu diundang dalam forum					
		b. Bebas menyampaikan pendapat					
		c. Akses terhadap informasi strategis	1	2	3	4	5
		d. Mengetahui proses kolaborasi					
10	Keterlibatan dalam keputusan	a. Terlibat dalam keputusan penting					
		b. Usulan diterima					
		c. Menentukan arah program	1	2	3	4	5
		d. Masukan memengaruhi hasil keputusan					

Sumber: data diolah peneliti

Tabel 6. Kriteria Penilaian Tingkat Kepentingan (Interest) Stakeholder dalam Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

No	Parameter	Indikator	Penilaian				
			Tdk ada	Ad a 1	Ad a 2	Ad a 3	Ad a 4
1	Identitas & Peran Aktor	a. Terlibat dalam program sebagai: <i>user</i> , <i>provider</i> , atau <i>policymaker</i> b. Memahami dengan jelas peran saya dalam program c. Terlibat dalam perencanaan dan evaluasi program d. Kepentingan sesuai dengan arah program	1	2	3	4	5
2	Hubungan & Struktur Sosial	a. Hubungan antar pelaksana dan masyarakat berlangsung terbuka b. Komunitas saya memiliki akses terhadap informasi program c. Pemimpin komunitas berperan memfasilitasi kolaborasi d. Terdapat koordinasi jelas antara pemerintah dan masyarakat	1	2	3	4	5
3	Intensitas Koordinasi	a. Koordinasi dengan aktor lain kuat b. Koordinasi memengaruhi prioritas c. Interaksi membentuk kepentingan d. Sering berkoordinasi dalam program	1	2	3	4	5
4	Kualitas Hubungan	a. Hubungan harmonis dorong kolaborasi b. Hubungan baik membentuk kepentingan c. Kepercayaan antaraktor tinggi d. Relasi positif memperkuat peran	1	2	3	4	5
5	Persepsi Keberhasilan	a. Program sesuai harapan stakeholder b. Program dinilai efektif c. Harapan terhadap hasil tinggi d. Tujuan stakeholder tercapai	1	2	3	4	5
6	Kepuasan terhadap Hasil	a. Stakeholder puas terhadap hasil b. Output sesuai keinginan c. Harapan pribadi terpenuhi d. Kepentingan pribadi tercapai	1	2	3	4	5

Sumber: data diolah peneliti

2. Pengumpulan Data

Kuisioner disebarkan kepada 35 responden yang terdiri dari perwakilan berbagai instansi terkait, antara lain:

- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

- c. Tokoh masyarakat, akademisi, media, dan sektor swasta

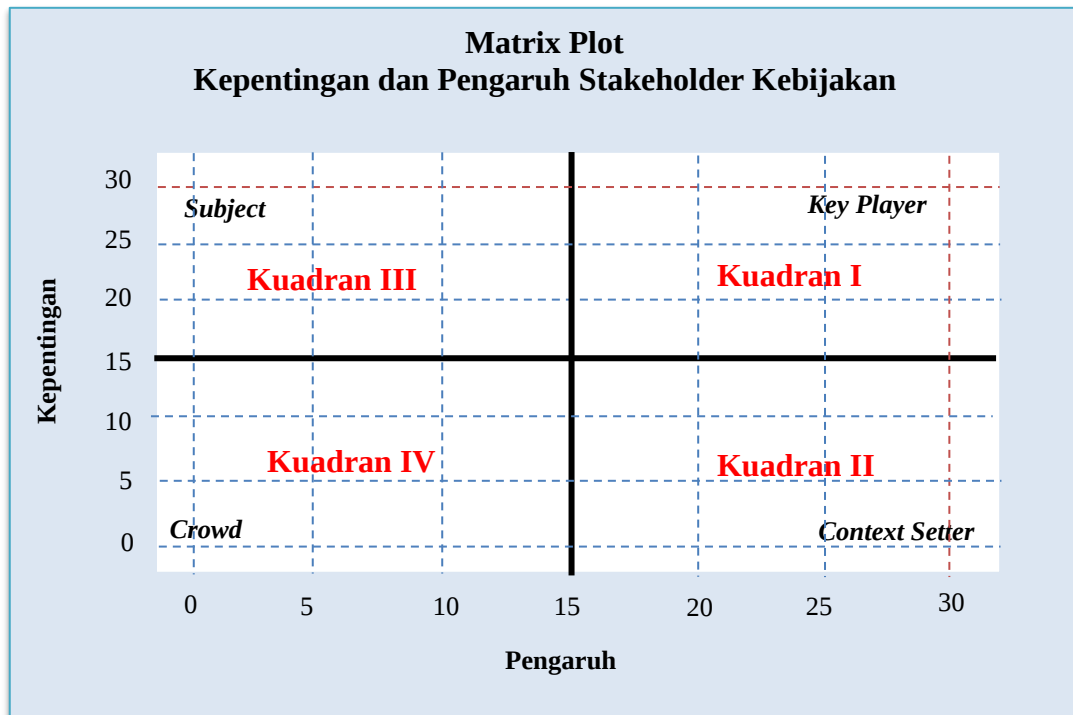
3. Pengolahan dan Analisis Data

Skor dari masing-masing responden dikompilasi dan dihitung rata-rata untuk setiap aktor pada dimensi power dan interest. Selanjutnya, nilai-nilai rata-rata tersebut diplot dalam Matriks Pengaruh dan Kepentingan (Power–Interest Grid). Berdasarkan posisi dalam matriks, aktor dikelompokkan ke dalam empat kategori kuadran sebagai berikut:

- a. Kuadran I – *Key Players*: Aktor dengan pengaruh dan kepentingan tinggi; menjadi aktor utama yang harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan.
- b. Kuadran II – *Context Setters*: Aktor dengan pengaruh tinggi tetapi kepentingan rendah; berperan penting dalam pembentukan kebijakan, meskipun tidak terlibat langsung dalam implementasi.
- c. Kuadran III – *Subjects*: Aktor dengan pengaruh rendah tetapi kepentingan tinggi; perlu diberdayakan karena memiliki komitmen terhadap isu namun tidak punya daya pengaruh.
- d. Kuadran IV – *Crowd*: Aktor dengan pengaruh dan kepentingan rendah; tetap diperhatikan, tetapi tidak menjadi prioritas utama dalam proses kolaborasi.

Berikut ini format matriks kepentingan dan pengaruh aktor kebijakan pada gambar 8:

Grafik 6. Matriks Kepentingan dan Pengaruh *Stakeholder*



Sumber: Adaptasi dari *The power-interest matrix* (Johnson and Scholes, 1999)

Penjelasan Kuadran:

1. Kuadran 4 (Kepentingan Rendah / Pengaruh Rendah)
Stakeholder di kuadran ini memerlukan perhatian paling sedikit karena pengaruh dan kepentingan mereka terhadap organisasi rendah. Mereka tidak terlalu terlibat dalam keputusan strategis, sehingga organisasi tidak perlu berfokus terlalu banyak pada mereka.
2. Kuadran 3 (Kepentingan Rendah / Pengaruh Tinggi)
Stakeholder di kuadran ini mungkin memiliki pengaruh besar terhadap organisasi, tetapi kepentingannya tidak sekuat itu. Namun, karena pengaruh mereka yang besar, organisasi perlu memastikan mereka dikelola dengan baik, dengan pendekatan yang lebih hati-hati agar mereka tidak mengganggu operasi atau kebijakan yang ada.
3. Kuadran 2 (Kepentingan Tinggi / Pengaruh Rendah)

Stakeholder di kuadran ini memiliki kepentingan besar terhadap keputusan organisasi tetapi tidak memiliki banyak kekuatan untuk mempengaruhi hasil. Meskipun pengaruh mereka rendah, mereka tetap perlu diperhatikan dengan baik, misalnya dengan cara memberikan komunikasi yang jelas atau menjaga hubungan yang baik.

4. Kuadran 1 (Kepentingan Tinggi / Pengaruh Tinggi)

Stakeholder di kuadran ini adalah yang paling penting untuk diperhatikan karena mereka memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh besar terhadap organisasi. Kelompok ini harus diberi perhatian khusus, dipelihara hubungan yang kuat, dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

3.5.2 Net Map

Net-Map merupakan metode pemetaan jaringan sosial yang digunakan untuk menganalisis hubungan dan interaksi antara aktor dalam suatu kebijakan atau program (Schiffer & Hauck, 2010). Dalam penelitian ini, Net-Map digunakan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang berperan dalam kolaborasi penanggulangan kemiskinan ekstrem, memahami pola hubungan di antara mereka, serta menentukan aktor dengan pengaruh paling signifikan dalam kebijakan tersebut.

Tujuan dari penggunaan metode Net-Map dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi aktor utama yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.
2. Memetakan jenis dan intensitas hubungan antar-aktor dalam kebijakan tersebut.
3. Menganalisis pengaruh aktor berdasarkan interaksi dan peran mereka dalam jaringan kebijakan.
4. Menentukan posisi strategis aktor dalam struktur jaringan untuk mengoptimalkan kolaborasi dan efektivitas kebijakan.

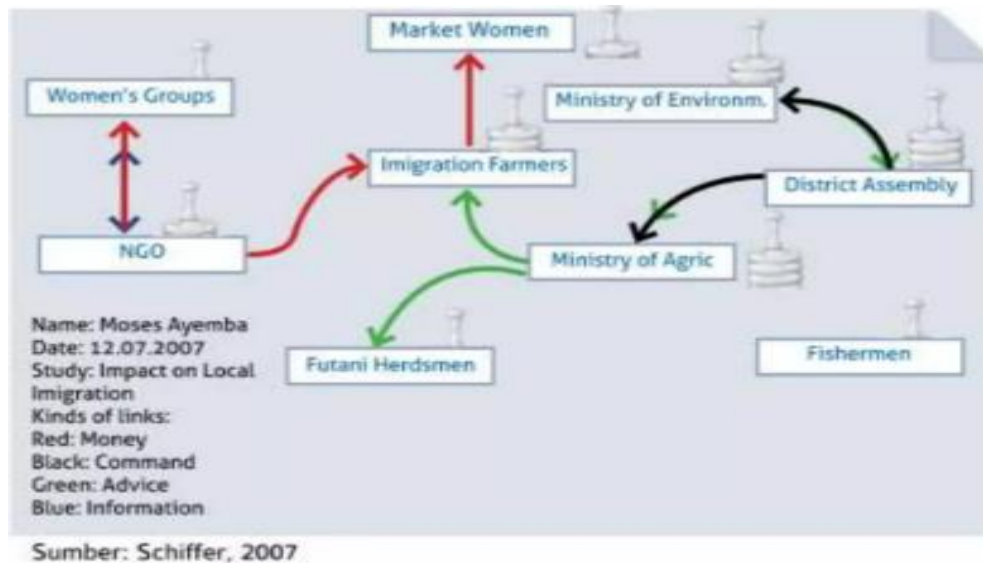
Data untuk Net-Map dikumpulkan melalui kuesioner tertutup yang diberikan kepada responden dari berbagai instansi terkait. Responden diminta untuk:

1. Mengidentifikasi aktor yang memiliki hubungan langsung dengan instansi mereka dalam implementasi kebijakan kemiskinan ekstrem.
2. Menentukan jenis hubungan yang mereka miliki dengan aktor lain, seperti *Command, Money, Information, dan Influence* (Schiffer, 2007).
3. Menilai intensitas hubungan dengan skala Likert 1-5 untuk menunjukkan seberapa erat interaksi mereka dengan aktor lain.

Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Aktor: Menentukan aktor yang paling berperan dalam jaringan kebijakan berdasarkan frekuensi interaksi yang dilaporkan oleh responden.
2. Pemetaan Jenis Hubungan: Mengelompokkan hubungan berdasarkan kategori yang telah ditentukan (*Command, Money, Information, Influence*).
3. Analisis Pengaruh Aktor: Menentukan aktor dengan pengaruh terbesar berdasarkan jumlah dan jenis hubungan yang dimiliki.
4. Evaluasi Efektivitas Jaringan: Mengukur sejauh mana pola interaksi antar-aktor mendukung efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem

Pada tahap ini akan dilakukan klasifikasi peran *stakeholder* dengan tabel, kemudian menggambarkan hubungan antar *stakeholder* berdasarkan aspek, antara lain yaitu *command, money, information, dan advise*. Berikut ditampilkan format mapping pemetaan *stakeholder*:



Gambar 6. Matriks Hubungan Aktor (Net Map)

3.5.3 Analisis SWOT

Sebelum masuk pada matriks SWOT, perlu dilakukan pengolahan data dengan matrik IFE dan EFE, berikut pengolahan data dengan matriks IFE dan EFE didasarkan pada langkah-langkah ini:

- a) Tahap Input (*Input Stage*) Tahap input terdiri dari matriks IFE dan matriks EFE yang bertujuan untuk memberikan input informasi dasar untuk matriks tahap pencocokan dan pembuatan keputusan. Menggunakan forum grup discussion dan dokumen.
- b) Matriks Faktor Strategi Eksternal dan Internal menurut Sedarmayanti (2014:97), Eksternal Faktor Evaluasi (EFE) Matriks digunakan untuk mengevaluasi faktor eksternal. Data eksternal dikumpulkan untuk menganalisis hal-hal menyangkut persoalan: ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, hukum, teknologi. EFE matriks bisa dikembangkan dalam lima langkah, David (2011:80):
 - 1) Membuat daftar faktor eksternal. Sertakan total 15 sampai 20 faktor, termasuk peluang dan ancaman, yang mempengaruhi perusahaan dan yang industri.
 - 2) Tetapkan setiap faktor dengan berat yang berkisaran dari 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat penting). Berat menunjukkan kepentingan relatif dan faktor yang menjadi sukses dalam industri perusahaan. Jumlah

semua bobot ditugaskan untuk faktor harus sama yaitu 1.0 bobot faktor merupakan hasil dari rata-rata dari hasil kuisioner pada pihak eksternal.

- 3) Penelitian menetapkan peringkat 1 sampai 4 untuk setiap faktor eksternal untuk menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan saat menanggapi faktor, dimana 4 = respon superior, 3 = respon diatas rata-rata, 2 = respon sama dengan rata-rata, dan 1 = respon kurang.
- 4) Kali nilai masing-masing faktor ini menurut peringkat untuk menentukan skor tertimbang.
- 5) Jumlahkan skor tertimbang untuk setiap variabel digunakan untuk menentukan total skor tertimbang untuk organisasi.
- 6) Bobot diperoleh dari rata-rata hasil kuisioner

Matriks internal faktor digunakan untuk mengetahui faktor internal perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting, Sedarmayanti (2014:97). Menurut David (2011:122). Matriks internal faktor berfungsi untuk merangkum dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama, dan juga memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan di antara daerah-daerah. Sebuah matriks IFE dapat dikembangkan dalam lima langkah:

- 1) Membuat daftar faktor internal. Sertakan total 10 sampai 20 faktor internal, termasuk kekuatan dan kelemahan.
- 2) Menetapkan bobot yang berkisara dari 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat penting) untuk masing-masing faktor. Jumlah semua bobot harus sama yaitu 1,0. Penentuan bobot merupakan hasil rata-rata dari kuisioner yang dibagikan kepada responden.
- 3) Peneliti menetapkan peringkat 1 sampai 4 pada setiap faktor untuk menunjukkan apakah faktor yang merupakan *major weakness* (rating = 1), *minor weakness* (rating = 2), *minor strenght* (rating = 4), atau *major strenght* (rating = 4).
- 4) Kali masing-masing faktor untuk menentukan skor tertimbang untuk masing- masing variabel.
- 5) Jumlahkan skor tertimbang untuk setiap variabel untuk menentukan total

skor tertimbang untuk organisasi.

- c) Tahap Pembobotan ini mempunyai rentang dari 0.0 (tidak penting) sampai dengan 1.0 (sangat penting). Pembobotan ini mengindikasikan seberapa penting faktor tersebut terhadap kesuksesan. Metode tersebut digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot setiap variable penentu eksternal dan internal dengan membandingkan setiap variable pada baris (horizontal) dengan variable pada kolom (vertikal).

Penentuan bobot setiap variable menggunakan skala 1,2 dan 3 skala yang digunakan untuk pengisian kolom adalah:

1 = Jika faktor horizontal kurang penting dari pada faktor vertikal.

2= Jika faktor horizontal sama penting dari faktor vertikal.

3= Jika faktor horizontal lebih penting dari pada faktor vertikal.

Bentuk penilaian pembobotan faktor internal dan eksternal perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut (Rangkuti, 2015):

Tabel 7. Format Penilaian Bobot Strategi Internal

Faktor Strategi Internal	A	B	C	D	...	Total	Bobot
A							
B							
C							
D							
...							
Total							

Sumber: Rangkuti, 2015

Tabel 8. Format Penilaian Bobot Strategi Eksternal

Faktor Strategi Eksternal	A	B	C	D	...	Total	Bobot
A							
B							
C							
D							
...							
Total							

Sumber: Rangkuti, 2015

Bobot dari setiap faktor diperbolehkan dengan membagi jumlah nilai setiap variable terhadap jumlah nilai keseluruhan variable dengan menggunakan

rumus sebagai berikut :

$$Ai = \frac{Xi}{\sum_{i=1}^n Xi}$$

Keterangan : ai = Bobot faktor ke – i

Xi = Nilai Faktor ke – i

I = ,2,...,n

d) Tahap Rating. Rating terdiri antara angka 1 sampai 4 yang mengindikasikan seberapa efisien strategi terhadap faktor kunci tersebut. Penilaian rating untuk lingkungan eksternal diberikan dalam skala pembagian sebagai berikut :

4 = respon pemangku kepentingan superior,

3= respon pemangku kepentingan diatas rata-rata,

2= respon pemangku kepentingan rata-rata dan

1= kelemahan utama.

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi program penanggulangan kemiskinan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strenght*) dan (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*Threats*) SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal strenght dan weakness serta lingkungan eksternal *opportunities* dan *threats* yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) (Rangkuti, 2018). Analisis SWOT memungkinkan ahli strategi untuk mengevaluasi situasi pemerintahan saat ini dan prospek masa depan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal secara bersamaan. Analisis SWOT mendorong pemangku kepentingan untuk memindai lingkungan internal dan eksternal, mencari faktor relevan yang mungkin mempengaruhi keunggulan kompetitif kebijakan dari perangkat daerah saat ini atau masa depan. Fokusnya adalah pada faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi secara positif atau negatif strategi program dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah. Untuk memfasilitasi analisis SWOT, pemangku

kebijakan menggunakan serangkaian pertanyaan strategis yang menghubungkan lingkungan internal pemerintah dengan lingkungan eksternal, seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini untuk memperoleh implikasi strategis, dalam matriks SWOT ini, sumbu horizontal dibagi menjadi faktor-faktor yang berada di luar pemerintahan dan sumbu vertikal menjadi faktor-aktor yang bersifat internal bagi pemangku kepentingan (pemerintah). Pada langkah pertama, perangkat daerah mengumpulkan informasi untuk analisis SWOT guna menghubungkan faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan) ke faktor eksternal (Peluang dan Ancaman). Selanjutnya, pemangku kepentingan menggunakan matriks SWOT yang dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategis di tunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 9. Matriks SWOT

IFAS (<i>Internal Strategic Factors Analysis Summary</i>)	Kekuatan / <i>Strength</i> (S) Tentukan faktor-faktor kekuatan internal	Kelemahan/ <i>Weaknesses</i> (W) Tentukan faktor-faktor kelemahan internal
EFAS (<i>Eksternal Strategic Factors Analysis Summary</i>)		
Peluang/ <i>Opportunities</i> (O) Tentukan faktor-faktor peluang eksternal	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan strategi yang memperbaiki kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman/ <i>Threats</i> (T) Tentukan faktor-faktor ancaman eksternal	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang memperbaiki kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Rangkuti (2018:84)

Berikut ini adalah keterangan dan matriks SWOT diatas:

1. Strategi *Strength-Opportunities* (SO) Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
2. Strategi *Strength-Threats* (ST) Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
3. Strategi *Weaknesses-Opportunities* (WO) Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
4. Strategi *Weaknesses-Threats* (WT) Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

3.5.4 Qualitative Strategic Planning Matriks (QSPM)

Menurut David (2016: 184), QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matrix*) adalah sebuah alat yang memungkinkan untuk mengevaluasi strategi alternatif secara objektif berdasarkan faktor-faktor kritis untuk faktor-faktor eksternal dan internal yang dikenali sebelumnya, serta QSPM juga memiliki penilaian yang baik untuk strategi yang akan dipilih.

Langkah-langkah QSPM meliputi:

- a. Melakukan input data dari matriks SWOT yang telah di formulasikan
- b. Mengambil alternatif strategi dari strategi SO, ST, WO, dan WT
- c. Melakukan penilaian *Attractiveness Score* (AS) dari hasil kuesioner *likert* dengan skor 1-4 yang diberikan para pakar kebijakan.
- d. Melakukan perhitungan *Total Attractiveness Score* (TAS), strategi dengan TAS tertinggi adalah strategi yang paling disarankan untuk diimplementasikan.
- e. Angka rating pada matriks QSPM yang diberikan harus berjumlah 1 atau sama dengan 100% sesuai pemberian tingkat signifikan oleh pembuat kebijakan atau hasil dari tingkat *score rating* pada tabel IFE dan EFE sebelumnya.

QSPM merupakan tahap terakhir dalam memformulasikan strategi. Berikut merupakan format dari matriks QSPM (David & David, 2016):

Tabel 10. Format Matriks QSPM

Faktor Kunci	Rating	Alternativ Strategi					
		Strategi 1		Strategi 2		Strategi 3	
		AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS
Peluang							
-							
-							
Ancaman							
-							
-							
Kekuatan							
-							
-							
Kelemahan							
-							
-							
Jumlah							

Sumber: David, 2016

Menurut David (2016), terdapat enam langkah penyusunan strategi QSPM, langkah penyusunan strategi terpilih melalui QSPM adalah sebagai berikut (David & David, 2016):

1. Memasukkan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan. Input datanya diperoleh dari matriks IFE dan EFE yang telah dibuat.
2. Memberikan bobot untuk setiap faktor sukses kritis internal dan eksternal. Bobot ini identik dengan yang digunakan pada matriks IFE dan EFE.
3. Mengidentifikasi strategi alternatif yang diperoleh dari matriks SWOT yang layak untuk diimplementasikan.
4. Menetapkan skor kemenarikan relatif (*Attractiveness Score*/AS) untuk masing-masing strategi alternatif yang terpilih.

Nilai 1= tidak menarik

Nilai 2= agak menarik

Nilai 3= menarik, dan

Nilai 4= sangat menarik

Nilai *Attractiveness Score* adalah seberapa besar daya tarik relatif

alternatif strategi dalam mengatasi faktor-faktor eksternal dan internal.

5. Menghitung *Total Attractiveness Score* (TAS). Yang diperoleh melalui perkalian bobot dengan AS pada masing-masing baris. TAS menunjukkan relatif *attractiveness* dari masing-masing alternatif strategi.
6. Menghitung jumlah *Total Attractiveness Score*. Menghitung jumlah *total attractiveness score* dengan cara menjumlahkan semua *total attractiveness score* pada setiap kolom QSPM. Nilai TAS yang tertinggi menunjukkan bahwa strategi tersebut yang paling baik untuk diterapkan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa struktur kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan masih bersifat hierarkis dan terpusat pada aktor-aktor pemerintahan, terutama Bappeda, Dinas Sosial, dan DPMD. Aktor-aktor tersebut merupakan aktor kunci yang mendominasi proses perencanaan dan implementasi kebijakan. Meskipun secara formal terdapat pelibatan berbagai pemangku kepentingan, hubungan antaraktor cenderung bersifat koordinatif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kolaboratif yang setara dan partisipatif.

Pendekatan kerangka IAD menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi di arena aksi belum sepenuhnya didukung oleh proses saling percaya, komunikasi dua arah, dan pembagian peran yang adil. Hal ini menggambarkan bahwa aktor-aktor dari unsur masyarakat, media, dan sektor swasta masih berada pada posisi yang kurang berpengaruh dalam struktur kolaborasi. Aktor yang paling berpengaruh dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem tetap didominasi oleh pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas dan sumber daya, sementara aktor lainnya cenderung memiliki kepentingan substansial terhadap isu kemiskinan tetapi belum mendapatkan ruang pengambilan keputusan yang proporsional.

Melalui analisis stakeholder, SWOT, dan QSPM, penelitian ini memberikan gambaran mengenai model kolaborasi yang lebih efektif ke depan, yaitu model kolaborasi publik-swasta yang mengedepankan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Strategi yang direkomendasikan adalah strategi SO (*Strength–Opportunity*), yaitu dengan memanfaatkan kekuatan utama untuk memanfaatkan peluang. Strategi ini meliputi penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi program CSR ke dalam program daerah, peningkatan akses aktor nonpemerintah dalam

forum pengambilan keputusan, dan penguatan sistem informasi berbasis spasial yang mendukung transparansi serta partisipasi semua pihak.

Dengan demikian, kolaborasi lintas aktor dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah akan lebih efektif apabila disusun secara setara dan deliberatif, dengan membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam forum kolaborasi publik-swasta yang berkelanjutan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi bermakna dalam pengembangan teori dan praktik tata kelola kolaboratif, terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem ditingkat daerah. Kebaruan yang dihadirkan terletak pada pemanfaatan Model *Institutional Analysis and Development* (IAD) untuk memahami secara lebih mendalam dinamika interaksi lintas-aktor, yang selama ini belum banyak diterapkan dalam studi kemiskinan di Indonesia. Pendekatan ini membuka ruang untuk melihat bagaimana relasi kuasa, kepentingan, dan potensi sinergi terjalin antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan media dalam membangun solusi bersama. Penggunaan metode analisis seperti *Net Map*, analisis pemangku kepentingan, SWOT, dan QSPM turut memperkaya sudut pandang dan memberikan fondasi yang kuat dalam merumuskan strategi berbasis data dan konteks lokal.

Meski demikian, penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan. Cakupan studi yang hanya berfokus pada Kabupaten Lampung Selatan tentu memiliki ruang keterbatasan dalam hal generalisasi ke wilayah lain yang mungkin memiliki karakter sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda. Selain itu, keterbatasan waktu serta variasi tingkat partisipasi dari aktor non-pemerintah dalam proses pengumpulan data, bisa saja berdampak pada kedalaman informasi yang diperoleh. Penelitian ini juga belum mampu menjangkau aspek keberlanjutan implementasi strategi secara jangka panjang. Berdasarkan temuan penelitian yang ada, model IAD dapat dikembangkan dengan memasukkan variabel tambahan berupa struktur kekuasaan lokal yang asimetris dan keterlibatan aktor informal. Hal ini penting karena dalam praktiknya, dinamika kolaborasi di pemerintah daerah tidak hanya

dipengaruhi oleh aturan formal dan atribut komunitas, tetapi juga oleh relasi kuasa dan intensitas komunikasi yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam model IAD

Oleh karena itu, temuan-temuan dalam tesis ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan eksplorasi yang lebih luas, baik secara geografis maupun tematik, serta memperkuat pendekatan kolaboratif dalam kebijakan sosial. Semoga gagasan dan model yang disusun dalam penelitian ini dapat memberi manfaat nyata, tidak hanya bagi pengembangan ilmu administrasi publik, tetapi juga bagi praktik pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

5.3 Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan penanggulangan kemiskinan ekstrem tidak hanya terletak pada kapasitas teknis, tetapi juga pada pola relasi dan dinamika kolaborasi antaraktor yang terlibat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata kelola kolaboratif yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan di Kabupaten Lampung Selatan, maka beberapa saran berikut disampaikan sebagai bentuk kontribusi strategis dan reflektif:

1. Memperluas ruang partisipasi lintas sektor. Pemerintah daerah perlu mendorong keterlibatan nyata dari berbagai pemangku kepentingan non-pemerintah, seperti akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta media. Pelibatan ini bukan sekadar representatif, melainkan bermakna: melalui dialog yang setara, perumusan solusi bersama, dan kehadiran aktif dalam pengambilan keputusan yang menyentuh langsung masyarakat miskin.
2. Memperkuat kelembagaan kolaboratif secara substantif. Pembentukan dan penguatan forum seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) perlu ditopang oleh regulasi yang jelas, struktur yang inklusif, serta mandat yang memungkinkan kolaborasi lintas sektor berjalan dengan koordinasi dan akuntabilitas yang baik. Ini penting agar kolaborasi tidak berhenti pada forum formal, tetapi benar-benar menjadi instrumen perubahan.
3. Membangun sistem evaluasi berbasis refleksi dan pembelajaran bersama. Evaluasi hendaknya tidak semata-mata berorientasi pada hasil administratif, tetapi juga menjadi momen untuk memperkuat kepercayaan, memperbaiki komunikasi, dan menumbuhkan pembelajaran bersama. Pelibatan semua aktor

dalam proses evaluasi baik sebagai pelaksana, penerima manfaat, maupun pengamat akan menciptakan suasana yang kondusif bagi inovasi kebijakan.

4. Menumbuhkan budaya kolaborasi yang didasarkan pada rasa saling percaya. Diperlukan ikhtiar yang konsisten untuk membangun relasi yang egaliter di antara aktor pemerintah dan non-pemerintah. Pendekatan yang humanis, terbuka, dan berbasis empati akan menjadi landasan penting bagi tumbuhnya rasa saling percaya yang menjadi fondasi utama dari setiap bentuk kolaborasi yang bermakna.
5. Pemanfaatan data dan teknologi untuk penguatan koordinasi. Data yang terintegrasi dan dapat diakses oleh semua aktor akan memperkuat legitimasi keputusan bersama. Begitu pula dengan teknologi informasi, yang apabila digunakan dengan bijak, dapat menjadi jembatan komunikasi lintas sektor yang mempercepat aksi dan meningkatkan efisiensi program.
6. Mendorong riset lanjutan dengan pendekatan kontekstual dan partisipatif. Penelitian ini masih terbatas pada analisis struktur dan strategi kolaborasi dalam konteks kelembagaan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peneliti berikutnya disarankan untuk menggali lebih dalam dinamika kolaborasi dari perspektif masyarakat akar rumput, atau fokus pada praktik kolaborasi spesifik di sektor tertentu seperti pendidikan, pertanian, atau kesehatan. Pendekatan etnografis, studi kasus lintas desa, atau evaluasi berbasis partisipasi warga dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana kolaborasi benar-benar dijalankan dan dirasakan oleh kelompok rentan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama seluruh pemangku kepentingan mampu membangun sinergi yang tidak hanya efektif dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem, tetapi juga menciptakan proses sosial yang memberdayakan, menghargai peran setiap aktor, dan menjadikan kolaborasi sebagai fondasi utama pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sasmita, A. (2022). *Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik*. Jakarta: Prenada Media.
- Agrawal, A. (1999). Accountability in decentralization: A framework with South Asian and West African cases. *The Journal of Developing Areas*, 33(4), 473–502.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Alam, K. (2014). Extending the Reach of Microcredit: A New Model for Poverty Alleviation through Livelihood Mapping in Bangladesh. *Journal of Poverty Alleviation & International Development*, 5(1).
- Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2020). The COVID-19 pandemic as a game changer for public administration and leadership? The need for robust governance responses to turbulent problems. *Public Management Review*, 23, 949–960. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1820272>
- Aryani, L. (2024). EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (Kasus di Lampung Selatan, Indonesia). *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 15(2), 211–222.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Tingkat Kemiskinan Ekstrem 2024*.
- Bappenas. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*.
- Bappenas. (2020). *RPJMN 2020-2024*.
- Bappenas. (2023). *Perpustakaan Kementerian PPN/Bappenas*. Bappenas.Go.Id. <http://perpustakaan.bappenas.go.id>
- Bebbington, A., & Foo, K. (2008). Social capital and development. In *The Companion to Development Studies* (pp. 186–190). Routledge.
- Beck, T., & Nesmith, C. (2001). Building on Poor People's Capacities: The Case of Common Property Resources in India and West Africa. *World Development*, 29, 119–133. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(00\)00089-9](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(00)00089-9)
- Brata, J. T., & Sapri, A. (2019). COLLABORATIVE MODEL IN THE SLUM PROGRAM OF THE KENDARI CITY. *The 1st International Seminar on*

Social Sciences and Development (ISSSD) Proceeding: Knowledge, Innovation, and Concern in Empowering Humanity for Social Development, 83.

Campos, P., & Reich, M. (2019). Political Analysis for Health Policy Implementation. *Health Systems & Reform*, 5, 224–235. <https://doi.org/10.1080/23288604.2019.1625251>

Carey, G., Dickinson, H., & Olney, S. (2019). What can feminist theory offer policy implementation challenges? *Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice*. <https://doi.org/10.1332/174426417X14881935664929>

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.

Darmawan, S. (2017). *Institutional Frameworks and Poverty Reduction: Lessons from Social Assistance Programmes in Indonesia*. September. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12884.91526>

David, F. R., & David, F. R. (2016). Manajemen strategik: Suatu pendekatan keunggulan bersaing. *Jakarta: Salemba Empat*.

David, F. R., & David, F. R. (2017). *Strategic management: concepts and cases: A competitive advantage approach*. Pearson.

Devereux, S., Sabates-Wheeler, R., Tefera, M., & Taye, H. (2006). Ethiopia's productive safety net programme (PSNP). *Trends in PSNP Transfers within Targeted Households. Final Report*. Sussex, UK: Institute of Development Studies and Indak International.

Fiszbein, A., & Schady, N. R. (2009). *Conditional cash transfers: reducing present and future poverty*. World Bank Publications.

Gedeona, H. T. (2013). Tinjauan Teoritis Pengelolaan Jaringan (Networking Management) Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(3), 360–372.

Globalization, W. C. on the S. D. of. (2004). *A fair globalization: Creating opportunities for all*. International Labour Organization.

Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. R. (2017). the Penta Helix Model of Innovation in Oman: an HEI Perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge & Management*, 12.

Harivarman, D. (2017). Hambatan komunikasi internal di organisasi pemerintahan. *Jurnal Aspikom*, 3(3), 508–519.

Heller, P., Harilal, K. N., & Chaudhuri, S. (2007). Building local democracy: Evaluating the impact of decentralization in Kerala, India. *World Development*, 35(4), 626–648.

- Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance*. Sage.
- Hulme, D., & Fukuda-Parr, S. (2015). *International Norm Dynamics and 'The End of Poverty': Understanding the Millennium Development Goals (MDGs)*. SSRN.
- Iza, S. M., & Nurhaeni, I. D. A. (2021). Proses kolaborasi dalam penanganan kemiskinan: studi kasus pada Program Gandeng Gendong di Yogyakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(2), 365–379.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). *Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tim Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (TNP2K)*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Khasanah, R., Purnomo, E., & Kasiwi, A. N. (2021). *Collaborative Governance In National Community Empowerment Programs In Poverty Alleviat*. 9, 29–35. <https://doi.org/10.31289/JPPUMA.V9I1.3755>
- Klijn, E. H., Koppenjan, J., Warsen, R., & Spekkink, W. (2015). *Governance networks in the public sector*. Routledge.
- Koisin, E. K. (2024). Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Model Collaborative Governance pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar. *REFORMASI*, 14(2), 271–283.
- Kunphoommarl, M., & Kunphoommarl, S. (2013). Social Policy and Community Welfare Management for Poverty Reduction in Thai Experiences: An Implication for Asian Countries. *Journal of Poverty Alleviation & International Development*, 4(1).
- Lawelai, H., & Nurmandi, A. (2023). The Model of Collaborative Governance in Addressing Poverty in Indonesia. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*. <https://doi.org/10.47134/rapik.v2i2.27>
- Levy, S. (2007). *Progress against poverty: sustaining Mexico's Progreso-Oportunidades program*. Rowman & Littlefield.
- Li, Y., Wu, W., & Wang, Y. (2021). Global poverty dynamics and resilience building for sustainable poverty reduction. *Journal of Geographical Sciences*, 31, 1159–1170. <https://doi.org/10.1007/s11442-021-1890-4>
- Lukman, A. (2024). Knitting Together: The Role of Collaboration in Alleviating Poverty. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*. <https://doi.org/10.59065/jissr.v4i2.155>
- Luna, A., Marinho, M., & De Moura, H. (2019). Agile governance theory: operationalization. *Innovations in Systems and Software Engineering*, 16, 3–44. <https://doi.org/10.1007/s11334-019-00345-3>

- Mahmud, F. L. (2020). Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Permukiman Di Provinsi Dki Jakarta). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 231–240. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/27319>
- McDonnell, I., Solignac Lecomte, H. B., & Wegimont, L. (2003). Introduction—The global anti-poverty consensus: driving the reform of international co-operation. *Public Opinion and the Fight against Poverty*. Paris: OECD, 11–14.
- Mergel, I. (2023). Social affordances of agile governance. *Public Administration Review*. <https://doi.org/10.1111/puar.13787>
- Mergel, I., Ganapati, S., & Whitford, A. (2020). Agile: A New Way of Governing. *Public Administration Review*. <https://doi.org/10.1111/puar.13202>
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik*.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi)*.
- Morrison, T. (2017). Evolving polycentric governance of the Great Barrier Reef. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114. <https://doi.org/10.1073/pnas.1620830114>
- Mote, S. (2020). Diskursus Teoretis Penerapan Good Governance dalam Formulasi Kebijakan Daerah. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 1–10.
- Moulton, S., & Sandfort, J. (2017). The Strategic Action Field Framework for Policy Implementation Research. *Policy Studies Journal*, 45, 144–169. <https://doi.org/10.1111/PSJ.12147>
- Nations, U. (2024). *End Poverty in All Its Forms Everywhere*. United Nations.
- Nyamboga, T. O., Nyamweya, B. O., & George, G. E. (2014). *An Assessment of Collaborative Development Based Approach on Poverty Reduction in Kenya: Case of Kenya Government and Civil Society Organizations*.
- Oktavianti, D. R., & Lituhayu, D. (2017). Implementasi Kebijakan Transportasi Umum Di Kota Semarang (Studi Kasus Perum Damri). *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 1–11.
- Peck, J. (2011). Global Policy Models, Globalizing Poverty Management: International Convergence or Fast-Policy Integration? *Geography Compass*, 5(4), 165–181. <https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2011.00417.x>
- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. (2022). Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lampung Selatan. Kalianda: Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. (2023). *LP2KD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023*. TKPKD Lampung Selatan.
- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. (2023). Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/203/V.01/HK/2023 tentang Lokasi Prioritas Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023-2024. Kalianda: Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. (2024). Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/59/V.01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024. Kalianda: Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- Philip, K. (2013). *The Community Work Programme: building a society that works*. ILO.
- PMK, K. (n.d.). *Layanan Data P3KE*. [https://p3ke.kemenkopmk.go.id/tanyajawab/#:~:text=1.,terhadap pendapatan dan layanan sosial](https://p3ke.kemenkopmk.go.id/tanyajawab/#:~:text=1.,terhadap%20pendapatan%20dan%20layanan%20sosial.).
- Pratama, I. N. (2023). Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 61–77.
- Previtali, P., & Salvati, E. (2023). Governance robustness put to the test by Covid-19. The case of Local Area Plans in the Lombardy Region. *European Planning Studies*, 31, 2637–2658. <https://doi.org/10.1080/09654313.2023.2203714>
- Ramadhani, N. P., Santoso, R. S., & Astuti, R. S. (2024). Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 116–133.
- Rangkuti, F. (2015). *Personal SWOT analysis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, F. (2018). Strategic Management: Theory and Practice. *Gramedia Pustaka Utama*.
- Sahar, A. R., & Salomo, R. V. (2018). Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pinrang. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 4(2), 49–64.
- Salvador, M., & Sancho, D. (2023). Local Governments Facing Turbulence: Robust Governance and Institutional Capacities. *Social Sciences*. <https://doi.org/10.3390/socsci12080462>
- Schiffer, E., & Hauck, J. (2010). Net-Map: collecting social network data and facilitating network learning through participatory influence network mapping. *Field Methods*, 22(3), 231–249.

- Schram, S. F., Fording, R. C., & Soss, J. (2008). Neo-liberal poverty governance: Race, place and the punitive turn in US welfare policy. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 1(1), 17–36.
- SDGs, S. D. G. (2024). *Tujuan Pertama Tanpa Kemiskinan*. Sustainable Development Goals SDGs.
- Singh, P., & Chudasama, H. (2020). Evaluating poverty alleviation strategies in a developing country. *PLoS ONE*, 15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227176>
- Ssewamala, F., Sperber, E., Zimmerman, J., & Karimli, L. (2010). The potential of asset-based development strategies for poverty alleviation in Sub-Saharan Africa. *International Journal of Social Welfare*, 19, 433–443. <https://doi.org/10.1111/J.1468-2397.2010.00738.X>
- Stevens, V., & Agger, A. (2017). Managing collaborative innovation networks: Practical lessons from a Belgian spatial planning initiative. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(3), 154–173.
- Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment*. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra.
- TNP2K. (2024). *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. TNP2K. <https://www.tnp2k.go.id/about/about-tnp2k>
- Toye, J. (2007). Poverty reduction. *Development in Practice*, 17(4–5), 505–510. <https://doi.org/10.1080/09614520701469427>
- Trein, P., & Tosun, J. (2019). Varieties of public–private policy coordination: How the political economy affects multi-actor implementation. *Public Policy and Administration*, 36, 379–400. <https://doi.org/10.1177/0952076719889099>
- Tribun Lampung. (2023, Mei 25). 35 desa di Lampung Selatan alami kemiskinan ekstrem. <https://lampung.tribunnews.com/2023/05/25/35-des-a-di-lampungselatan-alami-kemiskinan-ekstrem>
- Verschuere, B. (2009). The Role of Public Agencies in the Policy Making Process. *Public Policy and Administration*, 24, 23–46. <https://doi.org/10.1177/0952076708097907>
- Wampler, B. (2010). *Participatory budgeting in Brazil: Contestation, cooperation, and accountability*. Penn State Press.
- World Bank. (2009). *Conditional Cash Transfers*.
- Yu, N. G. (2013). The role of social work in Philippine poverty-reduction programs: ideology, policy, and the profession. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 23(1), 24–34.